



LAPORAN KINERJA PERWAKILAN RI DI RABAT TAHUN 2023

Visi:

"Mewujudkan diplomasi yang aktif dan efektif untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong di Maroko dan Mauritania."

KEDUTAAN BESAR
REPUBLIK INDONESIA
RABAT, MAROKO
2024

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah mewajibkan setiap instansi pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun Laporan Kinerja yang merupakan bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas mengenai capaian kinerja. Dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Rabat telah menyusun laporan kinerja selama tahun 2023.

Hal ini juga merupakan salah satu bentuk komitmen KBRI Rabat, Maroko sebagai instansi pemerintah RI dalam melaksanakan upaya-upaya perwujudan "*good governance*" sesuai tugas pokok dan fungsi-fungsi pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri.

Akhir kata, kiranya laporan ini dapat menjadi media komunikasi dan umpan balik, tidak saja bagi KBRI Rabat, tetapi juga bagi instansi terkait lainnya dalam upaya meningkatkan kinerja Perwakilan RI di masa mendatang dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia secara umum.

Rabat, 20 Januari 2024
Kepala Perwakilan RI

Hasrul Azwar
Dubes LBBP RI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sepanjang tahun 2023, KBRI Rabat telah membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja, yang merujuk pada Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri RI 2020-2024, Rencana Strategis KBRI Rabat 2020-2024, visi dan misi KBRI Rabat tahun 2023, serta perencanaan kinerja KBRI Rabat 2023.

Upaya pencapaian kinerja di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, perlindungan WNI, telah KBRI lakukan sepanjang tahun 2023 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan aktor baik di dalam maupun luar negeri; dan dengan menjembatani kepentingan Indonesia di 2 (dua) negara akreditasi, Maroko dan Mauritania, melalui fasilitas berbagai forum pertemuan dan kegiatan di wilayah akreditasi. Sedangkan, untuk mewujudkan tata kelola organisasi dan keuangan yang baik, KBRI juga telah berkoordinasi secara intensif dengan pusat terkait hal tersebut.

Kinerja KBRI Rabat di aspek substansi politik luar negeri dan manajemen telah memperoleh Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO) sebesar 105.34% atau naik sekitar 11% dari tahun 2022 yang hanya mencapai 94.23%. Capaian diukur melalui **4 (empat) perspective** (*stakeholders; customer; internal business process; dan learning and growth*); **9 (sembilan) Sasaran Strategis**, **15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama**, dan **7 (tujuh) sub-Indikator Kerja Utama**. Penjabaran mengenai capaian untuk masing-masing *perspective*, Sasaran Strategis, IKU dan sub-IKU dipaparkan lebih rinci pada bab III laporan kinerja ini.

Beberapa *highlight* kegiatan KBRI Rabat di tahun 2023 yang turut mendukung pada capaian kinerja, antara lain:

1. *Business Matching* antara PT Dixa Medica dengan beberapa Perusahaan Farmasi di Maroko tanggal 13-14 Februari 2022; dan partisipasi pada pameran *Salon International Agricole du Maroc* (SIAM) di kota Meknes, pada bulan Mei 2023.
2. Pendampingan dan dukungan KBRI Rabat bagi delegasi RI pada kegiatan *Interparliamentary Conference* pada bulan Juni 2023 di Marrakech; *International Conference on Water and Climate* pada tanggal 2 – 5 Juli 2023 di Fes; *World Bank – IMF Meeting* pada tanggal 9 – 15 Oktober di Marrakech yang dihadiri oleh Menkeu RI dan Gubernur BI; dan kunjungan Menlu RI pada tanggal 22 Desember 2023.
3. Penampilan budaya Indonesia dalam Resepsi Diplomatik RI pada tanggal 18 September 2023 yang diselenggarakan di Theatre Moh V Rabat dan dihadiri oleh lebih dari 400 tamu undangan dari berbagai kalangan, antara lain pemerintahan Maroko, Korps Diplomatik, dan masyarakat umum.
4. Berbagai kegiatan kekonsuleran dan perlindungan WNI di wilayah akreditasi.
5. Pembuatan 5 (lima) MoU, yaitu:
 - a. MoU antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI dengan *World Water Council* dan *International Network of Basin Organizations* (INBO) perihal penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah *World Water Forum* di Bali pada bulan Mei 2024 mendatang.
 - b. MoU antara IAIN Kudus dan Universitas Islam Internasional Indonesia dengan Universitas Sidi Mohamed Ben Abdallah, Fes.
 - c. Dua MoU antara 2 (dua) pesantren Indonesia (Daar El-Qolam di Tangerang dan Daarul Mughni di Bogor) dengan Universitas Mohamed 1 Oujda, dan
 - d. MoU Indonesia-Morocco Strategic Partnership yang ditandatangani pada saat kunjungan Menlu RI ke Maroko pada akhir bulan Desember 2023.

Meskipun secara umum, capaian kinerja dapat dikatakan sudah baik, namun, sama dengan tahun sebelumnya, masih ada beberapa mata kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain:

1. Proses perundingan PTA Indonesia-Maroko yang nampaknya masih memerlukan koordinasi dengan K/L terkait dari masing-masing pihak.
2. Kerja sama dengan Mauritania yang sebagian besar masih dalam fase peninjauan agar mendapatkan *output* dan *outcome* yang maksimal, serta
3. Kegiatan promosi terpadu yang kiranya dapat memperkuat citra Indonesia di negara akreditasi dan berpengaruh pada capaian di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya.

KBRI Rabat berharap kiranya di tahun-tahun mendatang, kegiatan diplomasi RI di Maroko dan Mauritania dapat lebih didukung oleh K/L teknis dan aktor non-pemerintah lainnya. Sehingga manfaat dan hasil kegiatan diplomasi KBRI Rabat dapat dirasakan oleh kalangan yang lebih luas lagi di Indonesia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
BAB I: PENDAHULUAN	6
1.1 LATAR BELAKANG	6
1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	6
BAB II: PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 RENCANA STRATEGIS	10
2.2 PERJANJIAN KINERJA KBRI RABAT TAHUN 2023	10
BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	14
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE	15
SASARAN 1.....	15
SASARAN 2.....	36
CUSTOMERS PERSPECTIVE	43
SASARAN 3.....	43
INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE	48
SASARAN 4.....	48
SASARAN 5.....	53
SASARAN 6.....	57
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE	58
SASARAN 7.....	58
SASARAN 8.....	60
SASARAN 9.....	62
3.2 REALISASI ANGGARAN	63
BAB IV: PENUTUP	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	65

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Capaian Kinerja KBRI Rabat tahun 2023	14
Tabel 3.1.1.1 Sasaran Strategis 1	16
Tabel 3.1.1.2 Daftar Pengusaha Maroko dalam Kegiatan Sosialisasi TEI 2023	22
Tabel 3.1.1.3 Indeks Citra	37
Tabel 3.1.1.4 Indeks Citra KBRI Rabat	38
Tabel 3.1.2.1 Target dan Capaian IKU Sasaran 3 KBRI Rabat Tahun 2023	45
Tabel 3.1.3.1 Target dan Capaian IKU Sasaran 4 KBRI Rabat Tahun 2023	49
Tabel 3.1.3.2 Target dan Capaian IKU Sasaran 5 KBRI Rabat Tahun 2023	54
Tabel 3.1.3.3 Target dan Realisasi Data WNI KBRI Rabat Tahun 2023	59
Tabel 3.1.4.1 Nilai AKIP KBRI Rabat Tahun 2023	61
Tabel 3.1.4.2 Indeks Pengelolaan Aset KBRI Rabat Tahun 2023	62
Tabel 3.1.4.3 Nilai Kinerja Anggaran KBRI Rabat Tahun 2023	64
Tabel 3.2 Realisasi Anggaran KBRI Rabat Tahun 2023	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

KBRI Rabat adalah sebuah perwakilan diplomatik Pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) dan memiliki negara akreditasi Kerajaan Maroko dan Republik Islam Mauritania. Sebagai sebuah perwakilan diplomatik yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP), KBRI Rabat memiliki peran sentral dan tanggung jawab besar dalam pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Pemerintah Republik Indonesia di negara akreditasi.

Guna mendukung tercapainya tujuan kebijakan politik luar negeri RI serta memperkuat kepemimpinan Indonesia dalam kerja sama internasional, KBRI Rabat mengambil peran dan tanggung jawab khusus untuk mempromosikan dan meningkatkan hubungan baik yang telah terjalin cukup lama antara Indonesia dengan Kerajaan Maroko dan Republik Islam Mauritania. Hubungan diplomatik Indonesia-Maroko diawali dengan kunjungan Presiden Soekarno tahun 1960 ke Maroko tidak lama setelah kemerdekaan Maroko tahun 1956. Sejak tahun 2012, KBRI Rabat juga merangkap akreditasi untuk Republik Islam Mauritania. Dengan demikian, misi dan tanggung jawab KBRI Rabat menjadi semakin luas sehingga diperlukan sebuah perencanaan kinerja secara optimal dengan tentu tetap mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) KBRI Rabat.

Keberadaan KBRI Rabat merupakan aspek strategis bagi politik luar negeri Indonesia, khususnya di Kawasan Afrika Utara. Maroko sebagai negara yang menghubungkan 3 (tiga) wilayah, yaitu Eropa, Afrika dan dunia Arab, juga menjadi salah poin yang menambah nilai penting keberadaan KBRI di Rabat. Untuk itu, KBRI Rabat senantiasa berupaya untuk menjadi penghubung bagi kepentingan Indonesia di ketiga kawasan tersebut.

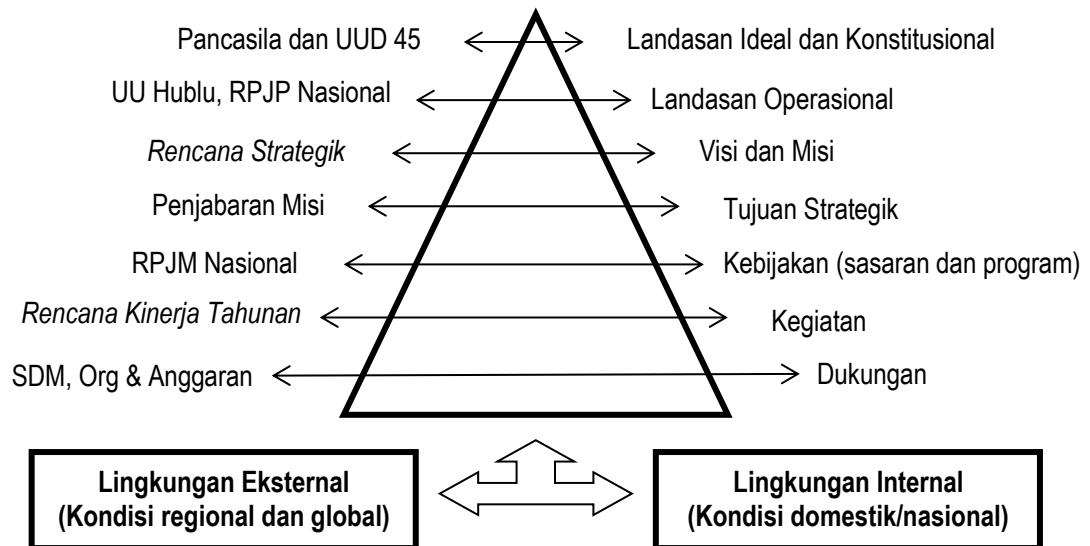
1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek strategis KBRI Rabat dinilai melalui analisis SWOT yang meliputi penilaian akan kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) yang dihadapi pada tataran internal dan eksternal. Penilaian menggunakan analisis SWOT memungkinkan KBRI Rabat melihat secara menyeluruh keseimbangan antara sumber daya yang dimiliki dengan strategi pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Analisis SWOT juga dipergunakan untuk melihat keselarasan antara strategi organisasi dengan visi misi KBRI Rabat termasuk kesesuaian dengan arah kebijakan politik luar negeri serta kepentingan nasional.

Penilaian aspek strategis KBRI Rabat dengan analisis SWOT juga dipergunakan untuk menilai perubahan internal dan eksternal yang berpengaruh pada pencapaian visi misi organisasi. Hal ini didasarkan asumsi bahwa hubungan internasional di masa mendatang akan terus semakin kompleks dan permasalahan internal di tingkat domestik

baik yang bersifat nasional maupun kedaerahan secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap kondisi pelaksanaan tugas di tingkat regional maupun internasional. Oleh karena itu keterpaduan upaya di tingkat nasional dengan peningkatan kerjasama bilateral, regional maupun internasional merupakan langkah mutlak yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan nasional.

Secara ringkas pola dan model perumusan kebijakan tersebut digambarkan sbb:



KBRI Rabat mempunyai posisi yang strategis dalam rangka pelaksanaan hubungan bilateral dengan dua negara, yaitu Maroko dan Mauritania. Peluang untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan kedua negara cukup besar mengingat disamping kedua negara memiliki penduduk mayoritas beragama Islam, juga terdapat banyak kesamaan pandangan dalam berbagai masalah regional maupun internasional; dan kedua negara juga sama-sama menganut kebijakan moderat dan merupakan anggota PBB, OKI, Kelompok G77 dan GNB. Selain itu, di bidang Kerja Sama Selatan – Selatan (KSS), Maroko dan Mauritania merupakan negara potensial penerima bantuan kerja sama teknis yang dapat menjadi pijakan untuk meningkatkan KSS dan memperkuat peran kepemimpinan Indonesia di dunia internasional khususnya di antara negara berkembang, sekaligus meningkatkan perekonomian nasional Indonesia.

Analisis aspek strategis organisasi KBRI Rabat dapat digambarkan sebagai berikut:

1) **Strengths (Kekuatan-Kekuatan):**

- a. Kapasitas Institusi KBRI Rabat yang terdiri atas unsur pimpinan, unsur pelaksana, dan unsur penunjang yang sejauh ini terbina dan terkelola dengan baik, menjadi landasan yang kuat dalam menjalankan misi diplomasi dan menjawab tantangan diplomasi di masa kini dan masa mendatang serta mampu mengelola diplomasi yang lebih seimbang antara diplomasi bilateral, regional dan global/multilateral.
- b. Kedudukan KBRI Rabat secara permanen menjadi dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan visi dan misi KBRI Rabat di negara akreditasi.

- c. Dukungan anggaran dan fasilitas perkantoran yang cukup.
- d. Dukungan *stakeholder* terkait di Indonesia dan negara akreditasi dalam melaksanakan tupoksi di negara akreditasi/wilayah kerja.

2) **Weaknesses (Kelemahan-Kelemahan):**

- a. Sumber daya manusia (SDM) yang memadai, khususnya dari segi keterampilan bahasa Prancis dan Arab yang baik. Hal ini menyebabkan koordinasi dengan mitra kerja di negara akreditasi sedikit terhambat. Selain itu, regenerasi dan peningkatan kapabilitas SDM juga perlu dilakukan agar KBRI Rabat dapat terus meningkatkan kualitas kinerja organisasi.
- b. Pengumpulan dan pengelolaan *database* yang belum optimal, seperti data WNI untuk kegiatan perlindungan; data dan informasi mengenai mitra kerja sama di bidang politik, sosial dan ekonomi; serta data dan informasi mengenai negara akreditasi untuk bahan evaluasi dan pengembangan kerja sama masih dapat ditingkatkan.
- c. Merujuk pada kelemahan pada poin b, minimnya kemampuan mengelola data dan informasi tersebut seringkali membuat transfer pengetahuan dari pejabat lama ke pejabat pengganti menjadi terkendala. Sehingga, sebagian besar strategi diplomasi yang dilakukan masih berorientasi pada *output* dan capaian jangka pendek.

3) **Opportunities (Peluang-Peluang):**

- a. Indonesia, Maroko dan Mauritania merupakan negara anggota PBB, G77, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Gerakan Non-Blok. Keanggotaan pada organisasi yang sama ini merupakan modal politik bagi KBRI Rabat dalam mengembangkan kerjasama dengan kedua negara akreditasi.
- b. Kebijakan bebas visa bagi WNI ke Maroko dan Visa on Arrival bagi WNI yang akan ke Mauritania memberikan peluang bagi pengembangan *people to people contact* di bidang politik, ekonomi maupun sosial-budaya.
- c. Peresmian Kedubes Mauritania di Jakarta sejak tahun 2019 diharapkan dapat mempermudah kerja sama dengan Mauritania di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya dan perlindungan WNI/BHI.
- d. Kian meningkatnya jumlah masyarakat Indonesia di negara akreditasi, khususnya pelajar Indonesia di Maroko, merupakan peluang bagi KBRI Rabat untuk dapat mencapai misi diplomasi di negara akreditasi.
- e. Keterbukaan dari pihak Mauritania untuk melakukan kerja sama dengan Indonesia di segala bidang, termasuk politik, ekonomi dan sosial budaya.
- f. Terdapatnya 19 perjanjian¹ kerja sama antara Indonesia dengan Maroko yang masih aktif dan 1 perjanjian kerja sama dengan Mauritania (pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Mauritania) sebagai media untuk meningkatkan kerja sama di bidang politik, perdagangan, pariwisata, investasi, kebudayaan dan perlindungan WNI/BHI.

4) **Threats (Ancaman/Hambatan):**

- a. Indonesia masih belum banyak dikenal di kedua negara akreditasi. Hal ini dikarenakan kecenderungan Maroko dan Mauritania untuk membangun

¹ Jumlah ini merupakan jumlah yang tercatat di website Treaty Room Kemlu RI per November 2023.

hubungan dengan kawasan Afrika (seperti wilayah Afrika Barat dan Afrika Utara) dan Eropa (utamanya dengan Prancis dan Spanyol) karena kedekatan geografis dan sejarah di masa lampau. Selain itu, bagi Maroko dan Mauritania, Indonesia bukan merupakan pasar tradisional bagi kedua negara dan begitu pula sebaliknya.

- b. Maroko dan Mauritania merupakan dua negara yang memiliki sistem politik, tingkat perekonomian yang berbeda. Sehingga diperlukan strategi pengembangan kerja sama yang berbeda dengan kedua negara tersebut.
- c. Upaya Maroko untuk memasukan Sahara Barat menjadi bagian wilayah nasional mereka, dan telah dibukanya hubungan diplomatik Maroko-Israel di akhir tahun 2020. Sedangkan di bidang ekonomi, Maroko tengah gencar mengupayakan untuk menjadi negara eksportir produk pertanian terbesar di Afrika. Salah satunya dengan upaya untuk mengeksport jeruk Maroko ke pasar Indonesia. Hal ini membuat beberapa proses perundingan, termasuk perundingan PTA Indonesia-Maroko, menjadi terkendala karena selalu disinggungkan dengan strategi politik dan ekonomi Maroko tersebut.
- d. Minimnya jumlah pekerja migran Indonesia yang terdidik dan bekerja di sektor formal di negara akreditasi; dan minimnya jumlah perusahaan Indonesia yang siap dan layak melakukan ekspor (belum memiliki *business plan* yang baik) ke negara akreditasi, membuat pengembangan kerja sama di bidang sosial budaya, perlindungan WNI dan ekonomi sering terkendala.

Mencermati penjelasan di atas, maka permasalahan yang sering dijumpai oleh KBRI Rabat dalam melaksanakan misinya sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Berbagai upaya pengembangan kerja sama di bidang politik dengan Maroko seringkali terkendala dengan sikap politik Maroko terhadap Sahara Barat. Sedangkan untuk Mauritania, meskipun pemerintah Mauritania lebih terbuka terhadap pihak asing, namun potensi kerja sama politik, ekonomi dan sosial budaya antara Indonesia-Mauritania belum tergarap dengan maksimal karena minimnya kesiapan kedua negara dalam bekerja sama.
2. Program kerja sama ekonomi yang belum maksimal karena 4 (empat) faktor utama, yaitu:
 - a. Minimnya data/informasi terkait pengusaha Maroko dan Mauritania yang kredibel.
 - b. Kualitas dan kesiapan aktor ekonomi di Indonesia.
 - c. Pemerintah Maroko yang memiliki perjanjian perdagangan yang eksklusif dengan negara/wilayah tertentu, seperti Prancis atau negara Eropa lainnya, dan
 - d. Perdagangan dengan Mauritania yang masih dapat dikatakan sangat minim dan terbatas.
3. Sulitnya pengembangan potensi kerja sama sosial budaya karena masih minimnya keterlibatan narator (tokoh Indonesia di bidang sosial budaya) Indonesia yang mumpuni; dan sulitnya mencari mitra kerja sama di negara akreditasi yang dapat diandalkan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) KBRI Rabat 2020 – 2024 merupakan turunan dari Renstra Kementerian Luar Negeri RI 2020 – 2024. Renstra KBRI Rabat 2020- 2024 memuat visi dan misi yang dijalankan oleh KBRI Rabat, yang selanjutnya digunakan sebagai rujukan pelaksanaan kegiatan KBRI Rabat.

Visi KBRI Rabat yaitu: **Mewujudkan diplomasi yang aktif dan efektif untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong di Maroko dan Mauritania.** Maka dari itu menjadi jelas bahwa setiap kegiatan KBRI Rabat, sebagai wakil negara di kedua negara akreditasi tersebut, hendaknya dilaksanakan secara aktif dan efektif sehingga memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia. Adapun untuk mencapai visi tersebut, KBRI Rabat memiliki 4 (empat) misi utama sebagaimana tertuang dalam Renstra KBRI Rabat 2020 – 2024, yaitu:

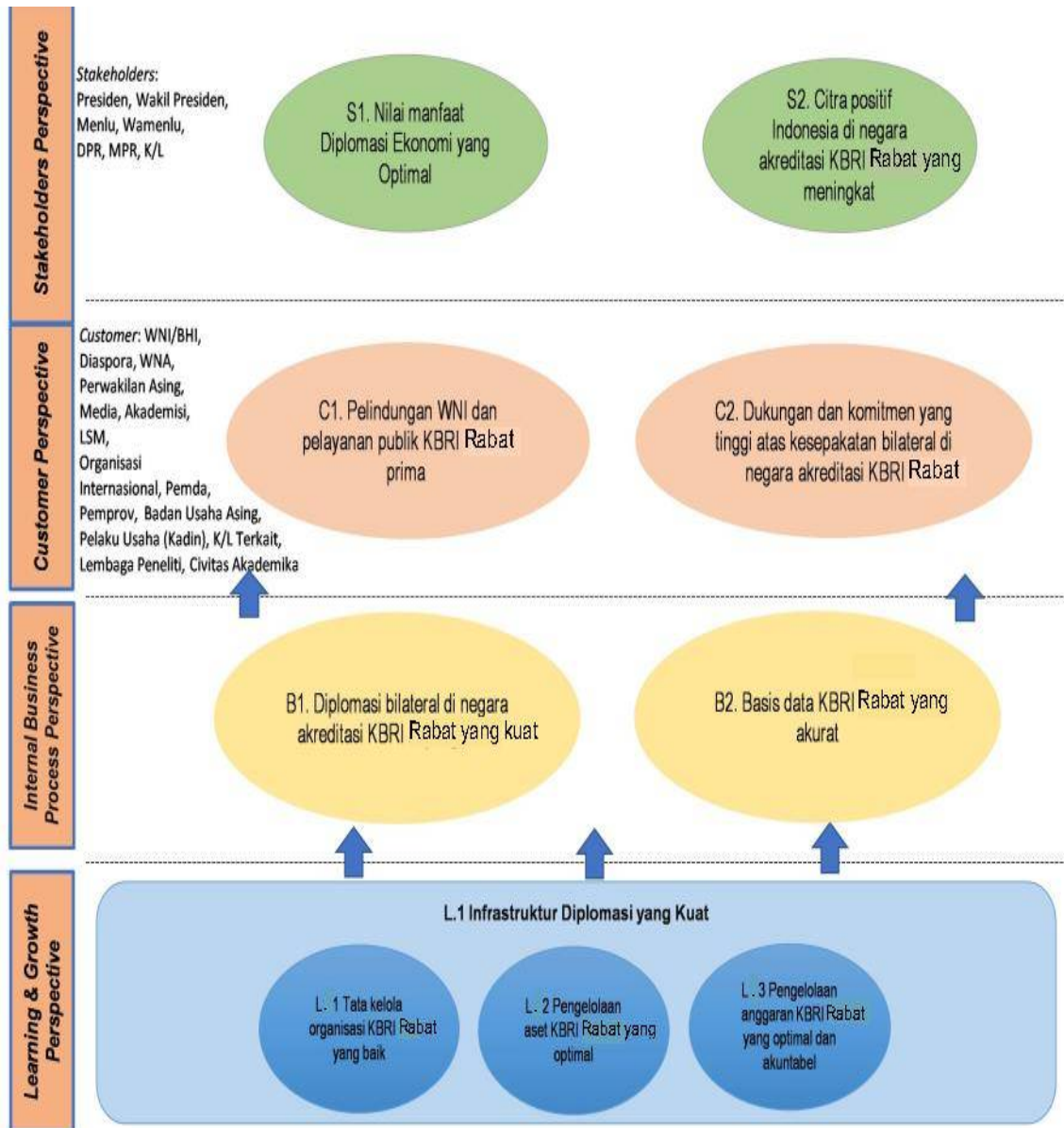
- 1) Memberikan nilai manfaat ekonomi yang optimal melalui hubungan luar negeri untuk mendukung struktur ekonomi Indonesia yang produktif, mandiri, dan berdaya saing di negara akreditasi.
- 2) Memberikan perlindungan WNI/BHI dan pelayanan publik di luar negeri yang prima sebagai upaya perlindungan bagi WNI yang ada di negara akreditasi.
- 3) Menjaga integritas NKRI yang bersinergi bersama dengan Pemerintah Pusat serta Daerah dan meningkatkan citra positif Indonesia di negara akreditasi.
- 4) Meningkatkan infrastruktur diplomasi KBRI Rabat untuk mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Dengan visi dan misi tersebut, terlihat jelas bahwa KBRI menjalankan fungsi dan tugasnya didasarkan kepada kepentingan nasional dan arah kebijakan luar negeri Pemerintah Republik Indonesia dengan mengoptimalkan segala kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya. Penyelarasan visi misi KBRI terhadap kepentingan nasional dan kebijakan politik luar negeri Pemerintah Republik Indonesia merupakan inti dari Aspek Strategis Organisasi yang memberi arah untuk mengatasi sejumlah permasalahan utama (*strategic issues*) yang dihadapi oleh KBRI dalam tahun 2022. Strategi organisasi tersebut direalisasikan dalam berbagai kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

2.2 PERJANJIAN KINERJA KBRI RABAT TAHUN 2023

KBRI berupaya mencapai visi dan misi tersebut melalui sebuah rencana kerja yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Kinerja KBRI Rabat dan ditandatangani pada tanggal 29 Januari 2022. Dokumen tersebut memuat 4 (empat) *perspective* kegiatan, yang terdiri dari 9 (sembilan) Sasaran Strategis; 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU); dan 7(tujuh) sub-
IKU dengan rincian sebagai berikut:

PETA STRATEGI PERWAKILAN RI RABAT TAHUN 2023



Stakeholders Perspective

1. **Sasaran pertama** adalah: Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi KBRI Rabat yang Optimal. **Indikator Kinerja Utama (IKU)** dari sasaran strategis ini adalah:
 1. **(S.1.1.)** Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan KBRI Rabat (94%).
 - Sub IKU 1: Jumlah Komitmen Perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Rabat (1 komitmen).
 - Sub IKU 2: Nilai perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Rabat (USD 250.000).
 2. **(S.1.2.)** Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi (85%).
 - Sub IKU 1: Jumlah Komitmen Investasi dengan negara akreditasi KBRI Rabat (2 komitmen).

- Sub IKU 2: Nilai investasi *inbound* dengan negara akreditasi KBRI Rabat (USD 200.000).
 - Sub IKU 3: Nilai investasi *outbound* dengan negara akreditasi KBRI Rabat (USD 500.000).
3. **(S.1.3.)** Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata (83%).
- Sub IKU 1: Tingkat potensi kunjungan wisatawan mancanegara dari negara akreditasi KBRI Rabat ke Indonesia (76%).
 - Sub IKU 2: Jumlah wisatawan mancanegara dari negara akreditasi KBRI Rabat ke Indonesia (150 kunjungan).
2. **Sasaran kedua:** Citra Positif Indonesia yang Meningkat di Negara Akreditasi KBRI Rabat. **Indikator Kinerja Utama (IKU)** yang ada adalah **(S.2.1)** Indeks Citra Indonesia di Negara Akreditasi KBRI Rabat dengan target 4 dari skala 5.

Customer Perspective

3. **Sasaran Ketiga:** Pelindungan WNI dan Pelayanan Publik KBRI Rabat yang Prima. **Indikator Kinerja Utama (IKU)** dari sasaran ini adalah
1. **(C.1.1.)** Persentase Kasus WNI di negara akreditasi KBRI Rabat yang diselesaikan (100%).
 2. **(C.1.2.)** Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KBRI Rabat. (4 dari skala 4), dan
 3. **(C.1.3.)** Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Pelindungan WNI/BHI KBRI Rabat (4, skala 4).
4. **Sasaran keempat:** Dukungan dan Komitmen yang Tinggi atas Kesepakatan Bilateral di Negara Akreditasi KBRI Rabat dengan target **Indikator Kinerja Utama (IKU) C.2.1** Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan Negara Akreditasi KBRI Rabat sebesar 85%.

Internal Business Process Perspective

5. **Sasaran kelima:** Diplomasi Bilateral di negara akreditasi KBRI Rabat yang Kuat, dengan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** sebagai berikut:
1. **(B.1.1.)** Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan target sebanyak negara akreditasi KBRI Rabat (1 kesepakatan).
 2. **(B.1.2.)** Jumlah Kesepakatan di Bidang Diplomasi Polkam dengan negara akreditasi KBRI Rabat (1 kesepakatan), dan
 3. **(B.1.3.)** Indeks Respons Positif terhadap Informasi *Data Economic Intelligence/Market Intelligence* KBRI Rabat dengan target 5 (skala 5).
6. **Sasaran keenam:** Basis Data KBRI Rabat yang Kuat. **Indikator Kinerja Utama (IKU) B.2.1.** Persentase WNI di negara akreditasi KBRI Rabat yang Terdaftar di Portal Peduli WNI dengan target 100%.

Learning and Growth Perspective

7. **Sasaran ketujuh:** Tata Kelola Organisasi KBRI Rabat yang Baik, dengan **Kinerja Utama (IKU) L.1.1.** Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Rabat dengan target nilai 73 (BB).

8. **Sasaran kedelapan:** Pengelolaan Aset KBRI Rabat yang Optimal, dengan **Indikator Kinerja Utama (IKU) L.2.1.** Indeks pengelolaan Aset KBRI Rabat (target 2.9 dari skala 4).
9. **Sasaran kesembilan:** Pengelolaan Anggaran KBRI Rabat yang Optimal dan Akuntabel. **Indikator Kinerja Utama (IKU) L.3.1.** Nilai Kinerja Anggaran KBRI Rabat dengan target nilai 85.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran, evaluasi dan analisis yang disajikan dalam LKJ ini difokuskan pada pencapaian target IKU pada masing-masing sasaran strategis. Dalam rangka menghasilkan penilaian yang komprehensif sesuai dengan aspek strategis organisasi, pengukuran pencapaian IKU juga didasarkan pada realisasi target kegiatan yang mendukung pencapaian IKU. Metode perbandingan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (Target/T) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (R) untuk mendapatkan capaian (C) organisasi.

Tahun 2023, semua Sasaran Strategis dan masing-masing Indikator Kinerja Utama telah memperoleh capaian yang sangat baik. Namun demikian, efisiensi waktu dan biaya yang digunakan untuk kegiatan masih dapat ditingkatkan di tahun-tahun mendatang.

Total capaian kinerja KBRI Rabat tahun 2023 adalah sebesar **105.34%**,

Perspective	Bobot Perspective	Skor Perspective
<i>Stakeholders Perspective</i>	25%	111.99%
<i>Customer Perspective</i>	15%	93.82%
<i>Internal Business Process Perspective</i>	30%	109.99%
<i>Learning and Growth Perspective</i>	30%	100.91%
Total NCKO	100%	105.34%

Dengan rincian capaian di tiap triwulannya adalah sebagai berikut:

TRIWULAN I		
Perspective	Bobot Perspective	Skor Perspective
<i>Stakeholders Perspective</i>	25%	86%
<i>Customer Perspective</i>	15%	112.49%
<i>Internal Business Process Perspective</i>	30%	120%
<i>Learning and Growth Perspective</i>	30%	120%
Total NCKO	100%	110.37%

TRIWULAN II		
Perspective	Bobot Perspective	Skor Perspective
<i>Stakeholders Perspective</i>	25%	114.24%
<i>Customer Perspective</i>	15%	78.95%
<i>Internal Business Process Perspective</i>	30%	118.72%
<i>Learning and Growth Perspective</i>	30%	120%
Total NCKO	100%	112.02%

TRIWULAN III		
Perspective	Bobot Perspective	Skor Perspective
<i>Stakeholders Perspective</i>	25%	103.75%
<i>Customer Perspective</i>	15%	86.74%
<i>Internal Business Process Perspective</i>	30%	106.26%
<i>Learning and Growth Perspective</i>	30%	120%
Total NCKO	100%	106.83%

TRIWULAN IV		
Perspective	Bobot Perspective	Skor Perspective
<i>Stakeholders Perspective</i>	25%	111.99%
<i>Customer Perspective</i>	15%	93.82%
<i>Internal Business Process Perspective</i>	30%	109.99%
<i>Learning and Growth Perspective</i>	30%	100.91%
Total NCKO	100%	105.34%

STAKEHOLDERS PERSPECTIVE

Sasaran Strategis 1: Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi KBRI Rabat yang Optimal.

Sesuai dengan tujuan keberadaan organisasi Perwakilan RI serta amanat kinerja dari Presiden RI, capaian kinerja diplomasi ekonomi perlu diukur relevansinya dengan capaian di bidang perdagangan, investasi, dan wisatawan mancanegara. Hal ini ditujukan agar hasil diplomasi dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat luas di tanah air.

Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal merupakan jumlah nominal manfaat secara ekonomi, keuangan, dan pembangunan yang paling menguntungkan yang dihasilkan oleh berbagai kerja sama dan hubungan perdagangan, investasi, dan pariwisata antara negara.

Sasaran 1 memiliki 3 (tiga) IKU dan 7 (tujuh) sub IKU sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut:

Kode.	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Persentase Capaian 2023
IKU S.1.1	Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan dengan Negara Akreditasi KBRI Rabat	94%	120%	N/A	106%	120%
Sub IKU 1	Jumlah Komitmen Perdagangan dengan Negara Akreditasi KBRI Rabat	1	1	N/A	1	100%
Sub IKU 2	Nilai Perdagangan dengan Negara Akreditasi KBRI Rabat	USD 250.000	USD 199 juta	N/A	USD 474,8 Juta	120%
IKU S.1.2	Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi dengan Negara Akreditasi KBRI Rabat	85%	120%	N/A	106%	120%
Sub IKU 1	Jumlah Komitmen Investasi dengan Negara Akreditasi KBRI Rabat	1	28	N/A	1	120%
Sub IKU 2	Nilai Investasi <i>Inbound</i> dengan Negara Akreditasi KBRI Rabat	USD 200.000	USD 1.029.600	N/A	USD 195.700	120%
Sub IKU 3	Nilai Investasi <i>Outbound</i> dengan Negara Akreditasi KBRI Rabat	USD 500.000	USD 5.000.000	N/A	USD 5.000.000	120%
IKU S.1.3	Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata dengan Negara Akreditasi KBRI Rabat	83%	94.11%	N/A	70.80%	120%
Sub IKU 1	Tingkat Potensi Kunjungan Wisman dari Negara Akreditasi KBRI Rabat	76%	80.64%	N/A	60.61%	105.87%
Sub IKU 2	Jumlah Wisman dari Negara Akreditasi KBRI Rabat ke Indonesia	150 kunjungan	150 kunjungan	N/A	75	100%

*nilai perdagangan terhitung dari Januari-Oktober 2023 (sesuai dengan ketersediaan data dari Kemendag per Desember 2023).

**Salinan total nilai perdagangan Indonesia-Maroko dan Indonesia-Mauritania terlampir di bagian akhir laporan.

Analisis

Data realisasi sasaran 1 didapatkan dari Kementerian Perdagangan, Badan Pusat Statistik dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia. Penilaian capaian sasaran 1 merupakan

capaian gabungan nilai perdagangan dengan dua negara akreditasi KBRI Rabat, Maroko dan Mauritania.

Meskipun IKU dan Sub-IKU yang baru dibuat dengan lebih terperinci, namun beberapa kelemahan teknik pengukuran masih ada; utamanya pada kemampuan KBRI untuk mengontrol capaian. Nilai efektivitas diplomasi di bidang perdagangan dan investasi sangat dipengaruhi oleh aktor-aktor (*stakeholders*) dari dalam negeri maupun luar negeri yang terlibat. Selain itu, tidak adanya koordinasi dan pencatatan data yang akurat di pusat juga menyulitkan klaim bahwa diplomasi di bidang perdagangan dan investasi ini sudah dilakukan secara optimal atau belum.

Sebagai contoh, nilai perdagangan, nilai investasi dan jumlah wisatawan bukan hanya hasil kinerja eksklusif Perwakilan RI di luar negeri; melainkan upaya bersama yang dilakukan atas kerja sama dari Perwakilan RI dan K/L maupun instansi terkait lainnya di dalam negeri. Contoh lain adalah dalam mengklaim jumlah wisatawan. Data BPS dan Ditjen Imigrasi memasukan negara Maroko dan Mauritania di kolom negara Timur Tengah dan negara Afrika lainnya. Sehingga sulit mendeteksi berapa banyak wisatawan dari Maroko dan Mauritania yang masuk ke di Indonesia. Selain itu, data yang digunakan untuk mengklaim capaian ini juga tidak dimiliki oleh Perwakilan RI/KBRI. Oleh karena itu, sulit menilai kinerja Perwakilan dari nilai-nilai yang dicantumkan pada IKU maupun sub-IKU. Adapun yang dapat KBRI lakukan adalah mendorong dan memfasilitasi proses pembuatan kerja sama perdagangan, investasi dan pariwisata antara Indonesia dengan negara akreditasi. Tantangan terkait sumber dan validitas data tersebut juga membuat analisis perbandingan capaian antara tahun 2023 dan 2022 menjadi sulit dilakukan.

Tantangan kedua dalam mencapai semua IKU dan sub-IKU ini adalah partisipasi aktor Indonesia, baik itu di level Kementerian/Lembaga, pihak swasta maupun aktor lainnya yang masih rendah. Sebagian besar kegiatan yang dilakukan untuk mencapai IKU dan sub-IKU masih merupakan inisiatif KBRI dan dilaksanakan secara mandiri/swakelola.

Terakhir, keterbatasan dana juga menjadi salah satu kendala utamanya untuk berkegiatan di negara akreditasi lainnya yaitu Mauritania. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh KBRI di bidang ekonomi, masih fokus di wilayah Maroko saja. Hal ini menyebabkan jaringan dan koneksi dengan pemerintah, pebisnis maupun aktor sosial budaya lainnya di Mauritania juga kurang berkembang dengan baik.

Terkait efektivitas diplomasi ekonomi di bidang pariwisata, angka capaian yang dicantumkan merupakan perkiraan minimum masuknya wisatawan dari negara akreditasi KBRI Rabat. Hal ini karena tidak diketahui secara pasti berapa banyak kunjungan wisatawan dari wilayah negara akreditasi KBRI Rabat (Maroko dan Mauritania) ke Indonesia. Pada data yang tercantum di BPS, wisatawan asal Maroko dan Mauritania dimasukkan ke dalam kategori negara Timur Tengah/Afrika lainnya. Selain itu, dengan adanya pemberian *visa on arrival* bagi WN Maroko, permohonan visa ke KBRI Rabat juga tidak dapat dijadikan rujukan pasti berapa jumlah wisatawan yang masuk ke Indonesia dari Maroko.

Realisasi dan persentase capaian pada Sasaran Pertama ini dipengaruhi, menurut pandangan KBRI, setidaknya oleh 3 hal utama, yaitu 1) kualitas para pelaku usaha Indonesia yang akan melakukan ekspor ke negara akreditasi; 2) kemampuan pelaku ekonomi Indonesia

untuk menyerap investasi dari luar negeri atau melakukan investasi ke luar negeri; dan 3) kapasitas dan kapabilitas pihak dalam negeri dalam menyajikan program dan layanan pariwisata yang menarik bagi orang asing. Selain itu, sebagian besar perdagangan Indonesia dengan Maroko maupun Mauritania masih dilakukan melalui pihak ketiga; yang mayoritas adalah negara-negara di Eropa, seperti Prancis, Spanyol, dan Belanda.

IKU S.1.1 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan dengan Negara Akreditasi KBRI Rabat dan **IKU S.1.2 Tingkat Efektivitas Diplomasi di Sektor Investasi dengan Negara Akreditasi KBRI Rabat** sesuai dengan tujuan keberadaan organisasi Kemlu dan Perwakilan RI serta melaksanakan amanat Presiden RI dalam RPJMN 2020-2024, yakni kinerja diplomasi perlu diukur relevansinya dengan capaian di bidang perdagangan agar hasil diplomasi dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat luas di tanah air. IKU ini secara spesifik mengukur *value* yang diperoleh Indonesia dari upaya diplomasi ekonomi untuk perdagangan. **IKU S.1.1 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan dengan Negara Akreditasi KBRI Rabat** ini memiliki 2 Sub IKU, yakni:

1. *Sub IKU-1: Jumlah komitmen perdagangan, dengan bobot 70%*
Sub IKU ini mengukur jumlah komitmen perdagangan yang diperoleh dari kegiatan diplomasi ekonomi yang menyangkut perdagangan, seperti *business matching*, pembukaan pasar potensial dan unggulan, promosi dagang dan forum kerja sama. Jumlah komitmen perdagangan dihitung untuk suatu negara akreditasi. Komitmen merupakan bentuk kesepakatan yang tertulis antara Indonesia dengan entitas di negara akreditasi, yang didalamnya memuat nilai perdagangan yang disepakati. Sub IKU-1 dibobotkan sebesar 70% karena pelaksanaan promosi dan fasilitasi proses pembentukan komitmen perdagangan merupakan bagian dari tugas dalam diplomasi yang dilaksanakan Kemlu.
2. *Sub IKU 2: Nilai perdagangan dengan negara mitra, dengan bobot 30%*
Sub IKU ini mengukur nilai perdagangan berupa ekspor yang terealisasi (dalam mata uang USD) dengan suatu negara akreditasi. Realisasi dari nilai perdagangan bersifat tahunan. Sub IKU 2 mendapatkan alokasi bobot 30% karena capaian sub-IKU dimaksud bukan hanya dikontribusikan oleh Kemlu namun merupakan upaya kolektif berbagai pihak (K/L terkait, dunia usaha, dll).

Sedangkan **IKU S.2.1 Tingkat Efektivitas Diplomasi di Sektor Investasi dengan Negara Akreditasi KBRI Rabat** memiliki 2 Sub IKU, yakni:

1. *Sub IKU-1: Jumlah komitmen investasi*
Sub IKU ini mengukur jumlah komitmen investasi yang diperoleh dari kegiatan diplomasi ekonomi yang menyangkut investasi, seperti *business matching*, pembukaan pasar potensial dan unggulan, promosi investasi dan forum kerja sama. Jumlah komitmen investasi dihitung untuk suatu negara akreditasi. Komitmen merupakan bentuk kesepakatan yang tertulis antara Indonesia dengan entitas di negara akreditasi, yang didalamnya memuat nilai investasi yang disepakati. Sub IKU-1 mendapatkan alokasi bobot 70% karena pelaksanaan promosi dan fasilitasi proses pembentukan komitmen investasi merupakan bagian dari tugas dalam diplomasi yang dilaksanakan Kemlu.

2. *Sub IKU 2: Nilai investasi dengan negara mitra*

Sub-IKU ini mengukur nilai investasi yang terealisasi (dalam mata uang USD) untuk suatu negara akreditasi di suatu tahun. Realisasi dari nilai investasi bersifat tahunan. Sub IKU 2 mendapatkan alokasi bobot 30% karena capaian sub-IKU dimaksud bukan hanya dikontribusikan oleh Kemlu namun merupakan upaya kolektif berbagai pihak (K/L terkait, dunia usaha, dll). Dengan memperhatikan situasi perekonomian di negara akreditasi, maka KBRI Rabat memilih nilai investasi yang diukur adalah investasi *inbound* dan *outbound*.

KBRI telah berupaya mencapai IKU S.1.1. dan S.1.2 melalui berbagai kegiatan seperti pameran dagang dan *business matching*; serta fasilitasi pertemuan dengan para pengusaha Maroko dan Mauritania, sebagai berikut:

1. *Business Matching Dexa Medica, 13 – 14 Februari 2023.*

Pada tanggal 13 – 14 Februari 2023, KBRI Rabat telah mendampingi 2 (dua) orang delegasi dari PT Dexa Medica, Bapak Pit Hoi dan Bapak Edward Christian (selaku Global Market Development, Dexagroup International) dalam kegiatan *Business Matching* dengan 4 (empat) perusahaan farmasi yang ada di kota Casablanca, Maroko, yaitu:

- a. Sante Pharma Industrie (SPI): pertemuan dengan Mr. Benouhoud Mohamed (Director General) dan Mr. Abderrahim Skalli (Manager).
- b. Pharmaprom; pertemuan dengan Ms. Samia Lahrichi (Marketing & Business Development Manager) dan Ms. Fatimazahra Zaitouni (Head of Production).
- c. Laprophan; pertemuan dengan Mr. Mohammed Abalil (Wakil CEO), Mr. Karim Hajji (Adviser of the President), Mr. Reda Bennis (Head of International Development Strategy and Diversification), dan Dr. Othmane Boumalif (Director of Medicine and Hospital), dan
- d. Dislog Group (BLS Pharma); pertemuan dengan Mr. Adil Belrhzal (Managing Director).

Dalam pertemuan dengan 4 (empat) perusahaan tersebut, PT Dexa Medica menawarkan 3 (tiga) model kerja sama bisnis yaitu 1) *Distributorship*; dimana perusahaan yang ada di Maroko menjadi importir untuk *finished product* Dexa Medica. 2) *Contract Manufacturing Organization* (CMO); model ini memungkinkan perusahaan farmasi Maroko untuk membuat produk *finished* atau *semi-finished* dengan Dexa Medica di Maroko, dan 3) *Clinical Research Organization*; kerja sama riset dan analisis data klinis antara PT Dexa Medica dengan perusahaan farmasi yang ada di Maroko.

Business Matching menghasilkan rencana kerja sama Pharmaprom dengan PT Dexa Medica untuk mengimpor (kerja sama *distributorship*) beberapa produk dari Dexa Medica, utamanya untuk produk onkologi yang sangat dibutuhkan di pasar Maroko. Informasi lain yang diperoleh dari kegiatan adalah *distributorship* merupakan bentuk kerja sama yang paling banyak diminati oleh perusahaan farmasi Maroko untuk jangka pendek. Sedangkan untuk kepentingan jangka panjang, mereka menginginkan adanya *transfer of knowledge* (CMO Business Model) dari PT Dexa Medica sehingga nantinya Maroko dapat memproduksi sendiri obat-obatan di dalam negeri.

Selain bertemu dengan 4 (empat) perusahaan farmasi yang ada di Maroko, Dexa Medica juga bertemu dengan Konsul Kehormatan RI, Mr. Khalil Benabdellah. Konhor RI memberikan beberapa masukan dan informasi terkait bisnis/industri farmasi di Maroko,

antara lain, 1) Laprophan merupakan pemain besar dalam industri obat di Maroko. Kerja sama dengan perusahaan besar, seperti Laprophan, biasanya akan memerlukan waktu yang jauh lebih lama dan prosedur yang mungkin lebih rumit dibandingkan dengan perusahaan lainnya; 2) Dislog Group merupakan perusahaan besar yang fokus di bidang distribusi, bukan hanya obat tetapi juga *consumer goods* lainnya. Kerja sama dengan Dislog akan memudahkan transportasi dan distribusi yang lancar ke seluruh Maroko. Beberapa perusahaan dan brand besar internasional telah bekerja sama dengan perusahaan ini dalam mendistribusikan produk mereka di Maroko, seperti Procter and Gamble, Unilever, Marsbars, dan lain sebagainya.

Foto Kegiatan



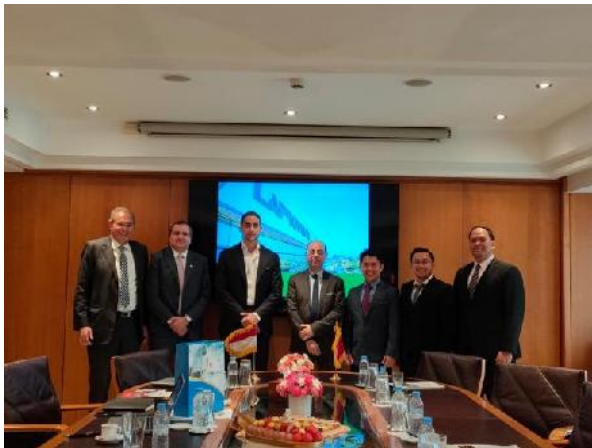
Pertemuan dengan *Sante Pharma Industrie*, di Hotel Hilton Garden Inn, Casablanca, 13 Februari 2023.



Pertemuan dengan *Marketing & Business Development Manager*, dan *Head of Production*, Pharmaprom, Maroko, tanggal 14 Februari 2023.



Pertemuan dengan *BLS Pharma/Dislog Group*, Maroko tanggal 14 Februari 2023.



Pertemuan dengan *Deputy CEO dan Head of International Marketing and Diversification*, Laprophan, Maroko.



Pertemuan dengan Konsul Kehormatan RI, Mr. Khalil Benabdellah.

2. Promosi Trade Expo Indonesia (TEI) 2023.

Dalam rangka mempromosikan TEI 2023 yang diselenggarakan secara *offline* pada tanggal 18 – 22 Oktober 2023 dan *online* pada tanggal 18 Oktober-19 Desember 2023, KBRI Rabat telah mensosialisasikan kegiatan TEI kepada perwakilan dari beberapa perusahaan Maroko di Ruang Serbaguna KBRI Rabat sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

- a. Tanggal 27 Juli 2023 dengan dihadiri oleh 6 perwakilan dari 5 perusahaan yaitu: Mr. Lahcen Kaddouri dan Mr. Mohammed Lahlouh dari Goodia Sarl; Mr. Larbi El Khiyar dari Mote3a Cafe Sarl; Mrs. Moukadrl Hafida dari Domaine Lrzane & Victoria Espérance; Mr. Rafik El Fechtali dari Ajara SARL; dan Mr. Hicham Zouhair dari Sigma Trading.



Kegiatan sosialisasi pertama TEI 2023 di Ruang Serbaguna KBRI Rabat

- b. Tanggal 3 Oktober 2023 yang dihadiri oleh 17 pengusaha yang tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Daftar pengusaha Maroko partisipan kegiatan sosialisasi TEI 2023 di KBRI Rabat tanggal 3 Oktober 2023

No	Nama	Perusahaan	Posisi	Sektor yang diminati
1	Lahcen Kaddouri	Goodia Sarl	Commercial Representative	Media
2	Mohammed Lahlouh	Goodia Sarl	Company Manager	Media
3	Larbi El Khiyari	Mote3a Cafe Sarl	-	Kopi dan Teh
4	Moukadrl Hafida	Domaine Lrzane & Victoria Espérance	CEO	
5	Rafik El Fechtali	Ajara SARL	Company Manager	Agrikultur
6	Hicham Zouhair	Sigma Trading	CEO	Kopi dan Teh
7	Sbai Mohammed	S-Plus-Tech		Trader
8	Rached Bennis	STE. BHR		Trader minyak dan gas
9	El Abdi Aloui Soufiane	Soularabat		Agrikultur dan energi
10	El Bakkouri Abdelouahab	Frobak	Manager	Layanan, klimatisasi
11	Mohammed Abeis			Industri Penerbangan
12	Shafi			Importir
13	Mr. Taghi			
14	Moukadiri Hafida	Domaine Lrzane & Vistoria Esperance	CEO	Agrikultur
15	Youssef Bachra	Univstrategy	Consultant	
16	Driss Sadouq	US-African and European Business Group, S.L	Business Development Manager	
17	Ilham Belkeziz	Concier Geriebeli	Direktur	



Foto kegiatan Sosialisasi kedua TEI di KBRI Rabat, 3 Oktober 2023.

Walaupun sudah ada beberapa pengusaha yang terdaftar untuk ikut di kegiatan TEI secara *offline* di Jakarta, namun upaya promosi TEI 2023 yang telah dilakukan belum bisa mendatangkan *potential buyer* dari Maroko ke Indonesia. KBRI menilai pebisnis Maroko yang hadir pada kegiatan sosialisasi kurang serius dalam menindaklanjuti rencana partisipasi pada TEI 2023 secara *offline* di Indonesia. Dari perbincangan yang

dilakukan pun, nampak tidak ada ketertarikan dari pengusaha Maroko tersebut untuk datang ke Indonesia.

3. Partisipasi pada *Salon International Agricole du Maroc (SIAM) di Meknes*.

Pada 2-7 Mei 2023, KBRI Rabat berpartisipasi di ajang pameran pertanian *Salon International L'Agriculture au Maroc (SIAM)* ke-15 tahun 2023 di kota Meknes, Maroko. SIAM Meknes merupakan ajang pameran pertanian yang meliputi: produk pertanian, alat pertanian, peternakan, dan temu bisnis dari pelaku industri pertanian di Maroko.

Tahun ini KBRI Rabat bekerja sama dengan ITPC Barcelona menampilkan berbagai komoditas unggulan yang berasal dari 13 perusahaan antara lain produk teh dari PT Gunung Subur Sejahtera (Kepala Djenggot), kopi (PT Singgamas), *essential oil* (PT Aroma Atsiri Indonesia, Mignon Sista International, Pemalang Agro Wangi), rempah-rempah (PT Javagri), Kopiko (PT Mayora Indah) dan gingerbon (PT Agel Langgeng), bumbu masakan siap saji (PT Bamboe Indonesia) dan kecap manis (PT ABC Heinz Indonesia) berdampingan dengan produk-produk Indonesia lainnya yang sudah memasuki pasar Maroko antara lain kopi arabika dari Indonesia Java Preanger, kopi robusta dari Javanegra Coffee serta batu alam, briket kelapa, hiasan kayu dan batu hijau milik PT Marokindo Jaya Bersama serta kayu gaharu dari Amier Oud Indonesia.

Selama pelaksanaan pameran, stan Indonesia setiap harinya mendapatkan perhatian yang cukup tinggi dari para pengunjung dan banyak membeli produk barang yang dipamerkan. Beberapa komoditas yang mendapatkan perhatian cukup tinggi adalah kopi dan kayu gaharu. Pengunjung stan juga bertanya mengenai bagaimana produk Indonesia bisa didapatkan di Maroko, bagaimana mendatangkannya ke Maroko dan kelebihan produk Indonesia tertentu dibandingkan produk pertanian yang sama dari negara lain.

Meskipun hingga hari terakhir pameran belum tercatat adanya transaksi dagang yang berhasil dilakukan, namun ketertarikan atas produk Indonesia yang dipamerkan telah memberikan gambaran akan adanya prospek yang dapat ditindaklanjuti. Terkait hal ini KBRI Rabat telah mencatat beberapa pengunjung yang berpotensi menjadi *buyer* produk pertanian Indonesia.

Selain pengunjung, stan Indonesia juga mendapatkan perhatian dari media lokal Maroko. KBRI Rabat dan ITPC Barcelona mendapatkan kesempatan untuk diwawancarai oleh radio nasional SNRT mengenai partisipasi Indonesia dalam SIAM Meknes 2023. Selain itu, salah satu *exhibitor* yaitu PT Marokindo Jaya Bersama juga diwawancarai oleh media *online* Maroc24 untuk menjelaskan mengenai produknya yang dipamerkan dalam stan Indonesia.

Foto Kegiatan



Dubes RI, Staf KBRI Rabat, Staf ITPC Barcelona dan PPI Maroko di depan booth Indonesia



Antusiasme pengunjung di booth Indonesia pada kegiatan SIAM Meknes 2023



Liputan media nasional Maroko di booth Indonesia

4. Penyampaian Informasi Terkait Investasi

Terkait upaya peningkatan investasi Indonesia dengan negara akreditasi, KBRI Rabat telah menyampaikan nota diplomatik perihal:

- a. *Call for Tenders* dari Kementerian Perlengkapan dan Air Maroko, tanggal 9 Januari 2023 (vide Brafaks No. B-00012/Rabat/230109).
- b. Informasi Potensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Government Procurement) di Maroko dan Mauritania, tanggal 14 April 2023 (vide Brafaks laporan No. B-00085/Rabat/230414).

Dari dua penyampaian informasi re penawaran investasi tersebut, sampai saat ini (*as of* Januari 2024) KBRI masih belum menerima tanggapan dari pihak-pihak terkait di Indonesia.

5. Dukungan KBRI pada Pembukaan Toko Gaharu Indonesia yang dimiliki oleh WNI di Casablanca, Maroko:

Pada tanggal 2 Desember 2023, Dubes RI beserta Konsul Kehormatan RI, Mr. Khalill Benabdellah, meresmikan toko yang menjual kayu Gaharu asal Indonesia. Pemilik toko merupakan WNI, Ibu Maria, yang menikah dengan WN Maroko dan membuka usaha impor Kayu Gaharu di Casablanca. Kegiatan dihadiri oleh tidak kurang dari 100 pengunjung yang terdiri dari pengusaha Maroko dan masyarakat umum yang tertarik dengan produk Kayu Gaharu dari Indonesia.

Sejauh ini, minat Masyarakat Maroko terhadap Kayu Gaharu sangat tinggi utamanya dari wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kayu Gaharu digunakan oleh Masyarakat Maroko sebagai bahan dasar Buhur (wewangian ruangan yang dibakar). Harga jual kayu Gaharu Indonesia bervariasi mulai dari 1 hingga 20 juta per kilogram. Berdasarkan informasi dari Ibu Maria, permintaan Kayu Gaharu asal Indonesia di Maroko bisa mencapai 5-6 ton per bulan.

Mengetahui besaran nilai perdagangan kayu Gaharu Indonesia di Maroko tersebut, Konhor RI menyampaikan kiranya penting untuk pembuatan PTA Indonesia-Maroko agar perdagangan dapat menguntungkan kedua belah pihak.



Duta Besar RI menghadiri peresmian Toko Hidaya Oud yang menjual produk Kayu Gaharu Indonesia di Casablanca, Maroko

6. Fasilitasi KBRI Rabat dalam pertemuan antara Office Cherifien Phosphate (OCP, Maroko) dan PT Pupuk Indonesia, 14 Desember 2023:

Pada tanggal 14 Desember 2023, KBRI telah memfasilitasi pertemuan antara OCP dan PT Pupuk Indonesia terkait pembelian fosfat Maroko sebagai salah satu bahan utama pembuat pupuk; dan rencana investasi Indonesia di OCP yang bertujuan untuk mengamankan produksi pupuk nasional.

Pertemuan dihadiri oleh Wijaya Laksana, Corporate Secretary PT Pupuk Indonesia; Josua Siregar, Senior Project Manager for Potash and Phosphate PT Pupuk Indonesia; Indraswono, Procurement Division PT Pupuk Indonesia; Mohammed Faical Lamrini (Marketing Division OCP); Jafar Hicham, Marketing Division OCP; dan EL Kabbadi Wai, Marketing Division OCP.

Dalam pertemuan PT Pupuk Indonesia menyampaikan keinginan untuk berinvestasi di OCP di bidang ekstraktif, namun hal tersebut masih belum dapat dilakukan. Sebagai hasil alam utama Maroko, Kerajaan Maroko tidak memberikan izin kepada pihak asing manapun untuk mengelola fosfat. Pihak OCP lebih menginginkan agar PT Pupuk Indonesia dapat menjadi *long term buyer* fosfat Maroko.



Pertemuan *online* antara PT Pupuk Indonesia dengan OCP Maroko, 14 Desember 2023

Sedangkan **IKU S.1.3 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata dengan Negara Akreditasi KBRI Rabat** mengukur kinerja diplomasi KBRI Rabat perlu yang relevan dengan capaian di bidang pariwisata agar hasil diplomasi dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat luas di tanah air. IKU S.1.3 memiliki 2 Sub IKU, yakni:

1. Sub IKU-1: *Tingkat potensi kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia*
Salah satu *output* diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Kemlu adalah promosi pariwisata. IKU ini mengukur efektivitas penyelenggaraan promosi tersebut dengan mengukur seberapa tinggi minat wisatawan mancanegara potensial yang merupakan

WNA yang memiliki ekspektasi untuk melakukan kunjungan wisata ke Indonesia setelah melihat/menghadiri/berpartisipasi pada promosi pariwisata dan budaya yang diselenggarakan oleh Kemlu atau *event* promosi yang diselenggarakan pihak lain di mana Kemlu turut menjadi peserta *event*. Sub-IKU ini mengukur wisatawan mancanegara yang memiliki ekspektasi tinggi untuk melakukan kunjungan wisata ke Indonesia. Level ekspektasi diukur dengan suatu angka antara 1-5, dimana 5 adalah level yang menunjukkan responden sangat setuju bahwa promosi Indonesia telah berhasil meningkatkan minat untuk berkunjung ke Indonesia, dan level 1 adalah level yang menunjukkan responden sangat tidak setuju bahwa promosi Indonesia meningkatkan minat untuk berkunjung ke Indonesia. Ekspektasi tinggi ditunjukkan pada level 4-5.

Sub IKU-1 mendapatkan alokasi bobot 70% karena pelaksanaan promosi pariwisata dan budaya untuk mendorong kunjungan wisatawan mancanegara merupakan bagian dari tugas dalam diplomasi yang dilaksanakan Kemlu. Target dan realisasi untuk Satker Regional adalah berturut-turut rata-rata dari target dan realisasi dari Perwakilan yang dinaunginya. Target dan realisasi untuk Kemlu adalah berturut-turut rata-rata dari target dan realisasi untuk seluruh Perwakilan.

2. Sub IKU 2: *Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia.*

Sub IKU 2 menunjukkan jumlah total warga dari negara asing yang mengadakan perjalanan wisata ke Indonesia. Sub IKU 2 mendapatkan alokasi bobot 30% karena capaian sub IKU dimaksud bukan hanya dikontribusikan oleh Kemlu namun merupakan upaya kolektif berbagai pihak (K/L terkait, Pemda, masyarakat dll) dan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal lainnya.

KBRI telah melaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung pada capaian IKU S.1.3., sebagai berikut:

1. Pelaksanaan 2 (dua) Kegiatan Promosi Budaya Indonesia di Maroko

Dalam rangka mempromosikan seni budaya dan juga ekonomi Indonesia, KBRI Rabat telah melaksanakan 2 (dua) kegiatan promosi budaya di Maroko, yang terdiri dari:

a. *Workshop* Seni Pertunjukan oleh Sanggar Seni Saung Angklung Udjo, 16 September 2023.

KBRI Rabat bekerja sama dengan sanggar seni Saung Angklung Udjo (SAU) Bandung dan sanggar seni Malaka Medan telah mengadakan kegiatan *workshop* seni pertunjukan di ruang serbaguna KBRI Rabat. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 16 September 2023 dengan mengundang para anggota Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Maroko, yang dikoordinasi oleh Departemen Olah Raga dan Seni PPI Maroko, diikuti sekitar 30 (tiga puluh) lebih peserta, undangan yang tadinya untuk 20 orang, akhirnya ditingkatkan menjadi 30 orang untuk menampung antusiasme peserta. Mereka ini pada akhirnya merupakan agen dalam menyebarkan budaya dan seni Indonesia di negara Maroko dan diharapkan turut membentuk citra baik Indonesia di negara akreditasi. Dengan demikian, diharapkan tingkat potensi kunjungan pariwisata ke Indonesia juga dapat meningkat.



Pelatihan *workshop* dari Saung Angklung Udjo kepada PPI Maroko

- b. Malam Pertunjukan Budaya pada Resepsi Diplomatik dalam rangka HUT RI ke-78, 18 September 2022.

Dalam rangka HUT RI ke-78, KBRI Rabat telah melaksanakan resepsi diplomatik pada tanggal 18 September 2023, di Gedung Teater Mohammed V Rabat yang dikemas dalam pertunjukan (konser) seni budaya Indonesia yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam. Kegiatan dihadiri oleh tidak kurang dari 400 tamu undangan yang terdiri dari kalangan Korps Diplomatik di Maroko, para Pejabat Maroko, *friends of Indonesia*, para WNI dan tamu undangan lainnya. Namun demikian, pada acara Resdip tahun ini perwakilan pemerintah Maroko yaitu *Minister of Economic Inclusion, Small Business, Employment and Skills of Morocco*, H.E. Younes Sekkouri, batal memberikan sambutan karena kegiatan dilaksanakan berdekatan dengan kejadian gempa yang menimpa Maroko pada tanggal 8 September 2023. Menteri Sekkouri hanya sempat hadir sebelum acara dimulai dan memberikan ucapan selamat kepada Dubes RI.

Kegiatan diawali dengan sajian kuliner khas Indonesia seperti tekwan, sate, nasi uduk, dan kue-kue khas Indonesia dengan dekorasi khas Indonesia seperti kain batik, kembar mayang dan ornamen lainnya. Hadir sebagai penampil di kegiatan ini adalah Sanggar Seni Saung Angklung Udjo dari Bandung dan Sanggar Seni Malaka dari Fakultas Budaya Universitas Sumatera Utara, Medan. Adapun beberapa penampilan yang disuguhkan antara lain; kolaborasi tari modern dan tari tradisional serta persembahan lagu-lagu daerah yang semuanya diiringi oleh musik *live* dari kedua sanggar seni. Sesi Angklung interaktif merupakan sesi yang paling banyak menarik perhatian penonton. Di masa mendatang, kiranya KBRI dapat lebih banyak berkolaborasi dengan para seniman profesional dari Indonesia untuk memperkenalkan budaya Indonesia dengan lebih optimal.



Para tamu undangan Resdip menikmati hidangan yang disajikan.



Minister of Economic Inclusion, Small Business, Employment and Skills of Morocco, H.E. Younes Sekkouri (Tengah), sempat datang di sebelum kegiatan Resdip dimulai dan memberikan ucapan selamat kepada Dubes RI.



Para penampil dan seluruh panitia Resdip berfoto setelah kegiatan berlangsung.

2. Partisipasi pada Berbagai Kegiatan Promosi Budaya di Maroko

Sepanjang tahun 2023, KBRI Rabat telah ikut berpartisipasi pada 6 (enam) kegiatan pameran dan promosi di Maroko dalam rangka mempromosikan budaya dan pariwisata Indonesia, seperti:

- a. Pembacaan puisi dalam *International Mother Language Day* di *Royal Institute of Amazigh Culture*, Rabat (21 Februari 2023).

Kegiatan diselenggarakan oleh *Royal Institute of Amazigh Culture* di Rabat, bekerja sama dengan UNESCO Maroko. Selain KBRI Rabat, beberapa Kedutaan Besar asing di Rabat juga ikut berpartisipasi, antara lain dari India, Palestina, Yaman, Tunisia, Afrika Selatan, Ukraina, Polandia dan beberapa institusi kebudayaan di Rabat. Dalam kesempatan tersebut, KBRI Rabat telah menyumbangkan puisi berbahasa Indonesia yang dibacakan oleh mahasiswa dan mahasiswi Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Maroko.



Penampilan PPI pada *International Mother Language Day* di *Royal Institute of Amazigh Culture*, Rabat

- b. Persembahan tari dalam *International Festival of Music and Children Song*, Rabat (8 - 10 Maret 2023).

KBRI Rabat berpartisipasi dalam kegiatan *International Festival of Music and Children Songs* ke 27 yang diselenggarakan oleh *El Adwatain Music Association* dari tanggal 8 sampai 10 Maret 2023 di Rabat. KBRI Rabat mengisi kegiatan pada tanggal 8 Maret, menampilkan tarian *Medley Nusantara*, gabungan tarian dari berbagai daerah di Indonesia oleh para pelajar dan mahasiswa Indonesia di Maroko. Penampilan para penari tersebut, bersamaan dengan penampilan dari beberapa sekolah di Rabat, grup kesenian lokal dan juga seniman dari Kongo, Kamerun dan Gabon.



Penampilan PPI pada kegiatan *International Festival of Music and Children Song* 2023.

- c. Persembahan tarian dalam *Mini Bazaar Diplomatic Circles* (14 Mei 2023)

KBRI Rabat bekerja sama dengan *Dharma Wanita Persatuan KBRI Rabat* telah berpartisipasi dalam kegiatan *Mini Bazaar Diplomatic Circles* 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2023 di area Sekolah *Pertamanan Sale*, di luar kota Rabat, Maroko. *Dharma Wanita Persatuan KBRI Rabat* telah menyumbangkan makanan khas Indonesia yang hasil penjualannya disumbangkan untuk *charity* (amal). Selain itu di stan Indonesia juga dipamerkan dan dijual berbagai kerajinan khas Indonesia, serta stan Indonesia dihias dengan dekorasi tradisional seperti patung-patung, kain batik, gapura dan pernik-pernik khas Indonesia. KBRI Rabat juga menyumbangkan tarian *Nandak Betawi* untuk memeriahkan bazaar, yang mendapat sambutan antusias dari pengunjung.



Penampilan mahasiswa Indonesia pada *Mini Bazaar Diplomatic Circle*, tanggal 14 Mei 2023 di *Sale*, Maroko.

- d. Partisipasi pada *Festival Story Telling di Rabat*. (19 - 25 Juni 2023).

KBRI Rabat telah berpartisipasi dalam kegiatan Festival Internasional ke 20 “Morocco Storytelling”, yang berlangsung selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 19 sampai 25 Juni 2023. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang berlangsung dalam skala cukup besar, diikuti wakil-wakil dari berbagai negara di Amerika, Eropa, Afrika dan Asia. Kegiatan dibuka di buka di situs arkeologi Chellah di Rabat dan ditutup di gedung Mounia Ramsis, Salle. KBRI Rabat telah menyumbangkan tarian Manuk Dadali pada saat penutupan festival pada tanggal 25 Juni 2023, yang dibawakan 3 (tiga) penari mahasiswi Indonesia di Maroko.



Penampilan mahasiswa Indonesia pada kegiatan penutupan Story Telling tanggal 25 Juni 2023 di Sale, Maroko.

- e. Partisipasi pada kegiatan *Morocco – Asian (MASIAN) Intercultural Meeting Exhibition* di Universitas Moh. V, Rabat, tanggal 10 – 12 November 2023.

KBRI Rabat telah ikut berpartisipasi dalam acara MASIAN (*Moroccan - Asian Intercultural Meeting*) di Fakultas Sciences Universitas Mohammad V Rabat. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Association Al Khayzourane tersebut bertujuan untuk memperkenalkan budaya Asia kepada masyarakat Maroko dan diikuti oleh 6 Kedutaan dari negara Asia di Maroko, yaitu India, Indonesia, Jepang, Korea, Tiongkok, dan Vietnam. Partisipasi KBRI berupa pameran batik dan angklung sebagai bagian dari Warisan Tak Benda UNESCO yang berasal dari Indonesia, serta produk budaya Indonesia lainnya. Selain itu, KBRI juga menampilkan tarian modern Indonesia dengan lagu Manuk Dadali dan kostum yang terinspirasi dari Garuda oleh para pelajar Indonesia yang ada di Maroko. Pada sesi penutupan, diputar pula film pendek Wonderful Indonesia untuk mempromosikan keindahan alam dan budaya Indonesia. Kegiatan dihadiri oleh 2500 pengunjung yang terdiri dari masyarakat umum dan kalangan akademika.



Pertunjukan tari Manuk Dadali oleh PPI Maroko di acara MASIAN



Booth Indonesia pada kegiatan MASIAN

f. Partisipasi pada *Bazaar Diplomatic Circle*, 25 November 2023.

KBRI Rabat telah mendukung kegiatan Dharma Wanita Persatuan KBRI Rabat dalam kegiatan *Bazaar Diplomatic Circle 2023* yang diadakan di kompleks Perpustakaan Nasional Rabat, Maroko tanggal 25 November 2023, yang dibuka oleh Putri Lalla Meryem, kakak Raja Mohammed VI.

Kegiatan ini merupakan acara amal bagi masyarakat Maroko yang terkena dampak bencana gempa pada tanggal 8 September 2023. Adapun DWP menyumbangkan seluruh keuntungan dari hasil penjualan makanan khas Indonesia, dan sebagian hasil penjualan produk kerajinan khas Indonesia. Stan Indonesia juga didukung oleh Perusahaan Indomie yang berada di Maroko, dengan menjual produk mie instan. Dengan demikian selain memperkenalkan kebudayaan dan meningkatkan citra Indonesia di negara akreditasi, kegiatan tersebut juga sebagai sarana promosi produk Indonesia.



Dubes RI (kiri) menjelaskan beberapa produk kerajinan Indonesia kepada Putri Lalla Maryam, kakak dari Raja Moh. VI (kanan) yang mengunjungi stan Indonesia.



Suasana stan Indonesia yang ramai dikunjungi selama kegiatan berlangsung.

Kendala yang dihadapi

Beberapa kendala yang dihadapi oleh KBRI dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai sasaran 1 diantaranya adalah:

1. Tantangan dalam memperoleh calon *buyer* yang kredibel dari negara akreditasi.
2. Sulitnya menemukan pelaku usaha Indonesia yang memiliki kualitas produk dan manajemen yang layak ekspor, serta berkeinginan untuk melakukan promosi langsung ke negara akreditasi.
3. Penjajakan kerja sama perdagangan dengan Mauritania baru pada tahap eksplorasi. Selain itu, diperlukan pula pendekatan yang lebih spesifik untuk meningkatkan perdagangan dengan Mauritania mengingat kondisi negara tersebut yang masih masuk ke dalam kategori *least developed country*. Sebaiknya dilibatkan pula Indonesian Aid untuk dapat memasuki pasar Mauritania.
4. Promosi ekonomi, dan sosial budaya sebagian besar dilakukan oleh kalangan non-profesional, seperti misalnya mahasiswa (PPI Maroko), dan belum ada kegiatan promosi terpadu di negara akreditasi.
5. KBRI tidak bisa membandingkan realisasi kinerja dengan target yang tertera pada Renstra karena pada tahun 2022, IKU untuk Sasaran Strategis Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi KBRI Rabat yang optimal mengalami perubahan.

Solusi yang telah dilakukan

1. KBRI telah berupaya untuk menyeleksi calon partisipan baik dari Maroko maupun Indonesia sebelum melakukan *Business Matching*.
2. Berupaya memasukan informasi/materi promosi yang tidak hanya fokus ke budaya tetapi juga kemajuan ekonomi Indonesia di berbagai kegiatan promosi.
3. KBRI juga telah berupaya melibatkan dan menghubungi K/L teknis terkait di dalam negeri untuk kegiatan promosi terpadu, namun seringkali belum mendapatkan tanggapan yang maksimal.

Sasaran Strategis 2: Citra Positif Indonesia yang Meningkat di Negara Akreditasi KBRI Rabat.

Citra positif Indonesia adalah persepsi yang dipercayai/diyakini aktor lain terhadap Indonesia yang didasarkan kepada pola perilaku yang ditunjukkan Indonesia dalam pergaulan internasional. Pola perilaku tersebut terbangun berdasarkan *power* yang dimiliki, baik yang bersifat *hard* maupun *soft*. Citra dalam hal ini dapat bersifat positif maupun negatif. Citra juga merupakan salah satu dampak akhir yang terbentuk dari suatu usaha diplomasi ataupun kebijakan luar negeri yang diambil. Citra positif adalah hal yang perlu dibangun oleh Indonesia di mata dunia internasional. Adanya citra positif yang terbentuk akan meningkatkan kepercayaan dunia internasional, sehingga dapat menempatkan posisi Indonesia sebagai negara yang berdaulat dalam berbagai aspek kehidupan.

Negara akreditasi/wilayah kerja adalah tempat kedudukan Perwakilan RI beserta negara/wilayah kerja rangkapan, serta organisasi internasional yang dimandatkan secara resmi untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah RI.

Citra merupakan salah satu dampak akhir yang terbentuk dari suatu usaha diplomasi ataupun kebijakan luar negeri yang diambil. Citra positif adalah hal yang perlu dibangun oleh Indonesia

di mata dunia internasional. Adanya citra positif yang terbentuk akan meningkatkan kepercayaan dunia internasional, sehingga dapat menempatkan posisi Indonesia sebagai negara yang positif dalam berbagai aspek kehidupan. Faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap citra meliputi isu-isu di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, isu-isu tersebut harus dapat dikelola dengan baik oleh Indonesia. Pemberitaan positif dan negatif tentunya akan berpengaruh terhadap *mindset* publik terhadap Indonesia, sehingga strategi dalam mengelola dan menangani media perlu dilakukan oleh Indonesia.

Indeks Citra merupakan indeks yang mengukur kesan atau pandangan dunia internasional terhadap negara Indonesia di dunia internasional. Indeks Citra Indonesia diperoleh berdasarkan survei yang mengukur 3 dimensi, yaitu *TOURISM & SOCIO-CULTURE*, *ECONOMY*, dan *GOVERNANCE & RULE OF LAW*. Sumber data didapatkan berdasarkan hasil kuesioner yang sudah diolah pada aplikasi pengelolaan data citra Indonesia di dunia internasional (<https://citraindonesia.kemlu.go.id>). Adapun responden merupakan WNA di negara akreditasi/wilayah kerja yang mengetahui Indonesia. Jumlah minimal responden pada setiap perwakilan ditentukan berdasarkan status perwakilan (minimal 50 responden untuk setiap perwakilan, kecuali untuk perwakilan kategori rawan dan berbahaya) dan dengan teknik pengambilan sampel sesuai metodologi survei yang digunakan.

Interval	Kategori Indeks
4.21 -5.00	Sangat Baik
3.41 – 4.20	Baik
2.61 -3.40	Cukup
1.81 – 2.60	Kurang
0 – 1.80	Tidak Baik

Indeks Citra = Total Indeks Rata – Rata Seluruh Responden /Jumlah Responden

Target dan capaian indeks citra KBRI Rabat adalah:

Kode	IKU	Target 2023	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Persentase Capaian 2023
S.2.1	Indeks Citra Indonesia di negara akreditasi	4 (skala 5)	3.28	3.67	4.4	4.16	104%

Analisis

Tahun 2023, Indeks Citra Indonesia yang diperoleh oleh KBRI Rabat sebesar 4.16 (kategori baik). Citra Indonesia diukur melalui 88 kuesioner yang diisi oleh WN asing penerima pelayanan kekonsuleran KBRI Rabat sepanjang tahun 2023, partisipan kegiatan promosi TEI 2023, pengunjung kegiatan *Indonesia Cultural Day* yang diselenggarakan oleh PPI Maroko bekerja sama dengan KBRI Rabat, pengunjung *booth* pada pameran SIAM Meknes 2023, dan kegiatan pembinaan masyarakat. Dari hasil kuesioner, diketahui bahwa masih ada beberapa responden yang belum mengetahui sama sekali tentang Indonesia. Untuk itu, kiranya

diperlukan program/kegiatan promosi terpadu yang bertujuan untuk memperkenalkan Indonesia di negara akreditasi.

Upaya KBRI untuk meningkatkan citra positif Indonesia yang telah dilakukan melalui berbagai kegiatan promosi dan pembinaan dan penggalangan dukungan dari masyarakat Indonesia (pelajar, pekerja migran dan kelompok masyarakat lainnya) dan *Friends of Indonesia* untuk meningkatkan citra Indonesia di Maroko. Beberapa kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 2023, yaitu:

1. Pemberian bantuan bulanan untuk sekretariat Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Maroko.
2. Pembinaan masyarakat Indonesia di Maroko dilakukan selama bulan Ramadhan dengan memanfaatkan kedatangan beberapa tokoh cendekia muslim Indonesia yang diundang oleh Raja Maroko untuk mengikuti kegiatan *Dourous Hasania*. *Durus Hasaniah* adalah kegiatan ceramah keagamaan pada bulan Ramadhan yang rutin diadakan oleh Kerajaan Maroko, mengundang tokoh-tokoh Islam dari berbagai negara.

Kehadiran para tokoh-tokoh Islam dari Indonesia tersebut diharapkan semakin memperkuat rasa persatuan di kalangan masyarakat Indonesia di Maroko dan lebih khusus lagi dapat memotivasi para pelajar dan mahasiswa untuk semakin bersemangat dalam menuntut ilmu di Maroko. Selain hadir WNI, juga diundang beberapa tokoh ulama dan pengajar Islam dari Maroko, yang merupakan bagian dari *friends of Indonesia* dalam acara yang diadakan oleh KBRI.

Kegiatan pembinaan yang telah dilaksanakan, yaitu:

- a. Pembinaan oleh Profesor Doktor Amany Lubis, guru besar dan mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Sekretariat PPI Maroko melalui diskusi dengan para anggota PPI, didampingi Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Maroko. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2023. Sebelumnya beliau juga hadir mengisi ceramah di Universitas Mohammed V Rabat.



Pertemuan Prof. Amany Lubis (ke-enam dari kiri atas) dengan PPI Maroko di Sekretariat PPI, Rabat.



Prof. Amany Lubis memberikan ceramah mengenai Islam di Indonesia di Fakultas Adab, Universitas Moh. V, Rabat.

- b. Pembinaan oleh KH Muhyidin Junaidi, pengurus Muhammadiyah dan MUI Pusat di Wisma Duta pada tanggal 9 April 2023 kepada masyarakat Indonesia, khususnya para anggota PPI Maroko.



Penyampaian ceramah oleh KH Muhyidin Junaidi di Wisma Duta tahun 2023.

- c. Pembinaan masyarakat oleh KH Yahya Chalil Staquf, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Ibu Zannuba Ariffah Chafsoh (Yenny Wahid), Direktur Wahid Institut kepada masyarakat Indonesia di Wisma Duta tanggal 16 Juni 2023.



PPI berfoto bersama KH Yahya Chalil Staquf, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Ibu Zannuba Ariffah Chafsoh (Yenny Wahid) pada kegiatan pembinaan WNI di Wisma Duta tahun 2023.

3. Kegiatan penggalangan ke masyarakat Maroko dilakukan melalui dua kegiatan selama bulan Ramadhan, yaitu:

- a. Pemberian bantuan kebutuhan bahan pokok kepada Asosiasi Penyandang Tuna Netra di kota Sale, oleh Duta Besar RI dan Staf KBRI Rabat serta ketua dan anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) KBRI Rabat, pada tanggal 14 April 2023. Bantuan diterima oleh Presiden Asosiasi Mr. Omar Ajboune. Setelah itu pemberian bantuan dilanjutkan ke Sekretariat Asosiasi Ribat Al Fath di kota Rabat, diterima oleh Wakil Presiden Asosiasi, Mrs. Najja Guedira. Asosiasi Ribat Al Fath adalah lembaga sosial yang didirikan untuk memberikan bantuan bagi masyarakat yang tidak mampu di Maroko.



Pemberian bantuan KBRI Rabat kepada Asosiasi Penyandang Tuna Netra (kiri) dan kepada Sekretariat Asosiasi Ribat El Fath (kanan).

- b. Pemberian bantuan bahan pokok ke masjid “Indonesia” di kota Kenitra oleh Duta Besar RI dan staf serta pengurus DWP KBRI Rabat pada tanggal 17 April 2023. Sumbangan diterima oleh Dr. Otmane Hamadi, Pejabat Bidang Keislaman di Kenitra dan Dr. Igoijime Mohcine, Presiden Dewan Cendekiawan Kenitra. Pemberian bantuan bahan pokok berupa gandum, gula, garam, makaroni, teh, kopi dan susu juga ditambah paket indomie dari SAMAWAG (perusahaan Indomie di Maroko) sangat diapresiasi oleh kalangan masyarakat yang membutuhkan dan lebih menguatkan citra Indonesia di wilayah Rabat dan sekitarnya.



Pemberian bantuan paket sembako kepada masyarakat tidak mampu di lingkungan Masjid Indonesia di Kenitra, Maroko

4. Penyelenggaraan Indonesia Cultural oleh Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Maroko bekerja sama dengan KBRI Rabat, di Open Theatre Taman Hassan II Rabat, pada tanggal 29 Juli 2023. Kegiatan menampilkan berbagai ragam seni budaya Indonesia, seperti: Tari Saman, Pencak Silat, penampilan teater Malin Kundang, penampilan Angklung, dan tari medley Nusantara. Kegiatan ditonton oleh tidak kurang dari 500 orang.



Penampilan budaya Indonesia pada kegiatan *Indonesia Cultural Day* yang diselenggarakan oleh PPI Maroko dan bekerja sama dengan KBRI Rabat tanggal 29 Juli 2023 di *Open Theatre* Taman Hassan II, Rabat.

5. Pelaksanaan rangkaian kegiatan peringatan HUT RI ke-78 di KBRI Rabat yang dihadiri oleh masyarakat dan pelajar Indonesia, yaitu:
- Gerak jalan santai dan pertandingan tenis meja yang diikuti oleh seluruh staf KBRI beserta keluarga pada tanggal 5 Agustus 2023. Rute gerak jalan sejauh 6 km ditempuh dengan mengelilingi kawasan sekitar KBRI Rabat.



- b. Lomba Rakyat yang diikuti oleh WNI, para pelajar Indonesia, serta staf dan keluarga KBRI Rabat yang ada di Maroko pada tanggal 12 Agustus 2023. Beberapa perlombaan yang dilakukan antara lain; balap karung, balap makan kerupuk, permainan kartu domino, dan lomba mewarnai untuk anak-anak.



- c. Upacara peringatan HUT RI ke-77 dan pemotongan tumpeng pada tanggal 17 Agustus 2023 di KBRI Rabat, yang diikuti oleh seluruh staf dan keluarga KBRI Rabat, serta masyarakat Indonesia yang ada di Rabat.



Kendala yang dihadapi

Menurut pandangan KBRI, penurunan indeks citra, dari 4.4 (tahun 2022) menjadi 4.16 (tahun 2023), tidak berkorelasi dengan citra masyarakat negara akreditasi terhadap Indonesia. Secara umum, Indonesia masih belum banyak dikenal di masyarakat Maroko dan Mauritania, selain sebagai negara mayoritas muslim. Adapun kemajuan Indonesia di bidang ekonomi dan sosial budaya belum banyak diketahui oleh masyarakat di negara akreditasi. Sebagai contoh, dalam bidang ekonomi dan pendidikan, sangat jarang warga yang berpikir untuk membeli produk Indonesia atau melirik Indonesia sebagai salah satu pilihan negara untuk studi di luar negeri.

Dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai IKU ini, sama dengan kegiatan untuk Sasaran Strategis 1, KBRI belum banyak bekerja sama dengan aktor non-pemerintah. Sepanjang tahun 2023, kegiatan Resepsi Diplomatik, dalam rangka HUT RI², merupakan satu-satunya kegiatan KBRI yang melibatkan unsur profesional dengan mendatangkan 22 (dua puluh dua) seniman dari Saung Angklung Udjo, Bandung; dan sanggar tari Malaka, Medan. Penyebab utama kesulitan ini adalah minimnya biaya promosi yang dimiliki oleh KBRI. Sedangkan untuk dapat mendatangkan tim kesenian profesional dari Indonesia, diperlukan biaya yang sangat mahal.

Solusi yang telah dilakukan

1. Mensiasati minimnya biaya promosi, KBRI telah berupaya mempromosikan Indonesia melalui kerja sama dengan PPI dan Dharma Wanita Persatuan sebagai tim pendukung.
2. Guna meningkatkan indeks citra, KBRI telah berupaya untuk meningkatkan partisipan WN Asing dalam pengisian kuesioner baik melalui jejaring diplomatik maupun non diplomatik yang dimiliki. Selain itu, dalam rangka melengkapi informasi yang kurang didapat dari kuesioner, KBRI juga berupaya memperoleh informasi mengenai pandangan dari pihak asing tentang Indonesia melalui percakapan non-formal dengan *counterpart* asing di negara akreditasi.
3. Terkait *outreach* kepada WN Mauritania, KBRI juga selalu berupaya memanfaatkan keberadaan mahasiswa Mauritania dan staf diplomatik Mauritania yang ada di Maroko, namun *engagement* yang dihasilkan masih belum maksimal.

CUSTOMERS PERSPECTIVE

Sasaran 3: Pelindungan WNI dan Pelayanan Publik KBRI Rabat yang Prima.

Pelindungan adalah segala upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan WNI dan BHI di luar negeri dengan memperhatikan masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri membutuhkan kualitas pelayanan dan pelindungan yang responsif, cepat, tanggap, transparan dan akuntabel, sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sedangkan pelayanan publik yang prima meliputi pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara Indonesia atau warga negara asing atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Perwakilan RI yang diatur oleh UU No. 25 tahun 2009.

² Kegiatan Resepsi Diplomatik merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai IKU peningkatan wisatawan sekaligus meningkatkan citra Indonesia di negara akreditasi.

Dalam sasaran strategis, perlindungan WNI di Luar Negeri dan pelayanan publik yang prima bertujuan memastikan pencapaian kinerja dalam upaya yang dilakukan oleh Kemlu RI untuk melindungi warga negara yang berada di Luar Negeri sesuai dengan Hukum Internasional dan kualitas pelayanan publik terkait kekonsuleran dan perlindungan WNI.

Pelindungan terhadap WNI di Luar Negeri mencakup penyediaan bantuan informasi, hukum dan/atau sosial. Prinsip yang diterapkan dalam upaya pelindungan WNI sesuai Permenlu No. 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan WNI di luar negeri, yaitu:

1. Mengedepankan keterlibatan pihak yang bertanggung jawab dan/atau berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata WNI;
3. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, hukum negara setempat, serta hukum dan kebiasaan internasional.

Sasaran ini memiliki 3 (tiga) IKU utama yaitu:

IKU C.1.1 Persentase kasus WNI di Negara Akreditasi KBRI Rabat yang diselesaikan, yang mencakup kasus khusus dan kasus umum yang sudah ditangani oleh Perwakilan RI di Luar Negeri dengan pihak-pihak terkait, seperti: pihak kepolisian, imigrasi, Kemlu di Indonesia dan negara setempat. Penanganan kasus WNI di Luar Negeri sesuai dengan prosedur/SOP, peraturan nasional, peraturan negara setempat dan internasional yang target penyelesaian setiap kasus berbeda. Perwakilan RI dapat menghapus Kasus Khusus apabila tidak terdapat Kasus Khusus di Negara Akreditasinya.

Kasus yang selesai (KS) adalah kasus yang telah ditangani sesuai dengan ketentuan hukum nasional; hukum negara setempat; dan/atau hukum dan kebiasaan internasional yang berlaku terkait pemenuhan hak-hak WNI di luar negeri. Kasus yang ditangani (KT) adalah kasus yang dihadapi oleh WNI di luar negeri sesuai dengan pengaduan, laporan, ataupun pemberitaan serta informasi yang diterima dari berbagai pihak, yang termasuk dalam lingkup pelayanan dan pelindungan WNI di luar negeri.

Untuk IKU persentase kasus WNI di negara akreditasi atau wilayah kerja Perwakilan RI yang diselesaikan, jika di negara akreditasi atau wilayah kerja Perwakilan RI tidak terdapat kasus khusus dan/atau kasus umum dapat diterapkan normalisasi untuk persentase kasus khusus dan/atau kasus umum WNI yang diselesaikan di setiap Perwakilan RI. Simulasi perhitungan persentase kasus WNI di negara akreditasi atau wilayah kerja Perwakilan RI yang diselesaikan dapat diterapkan dengan skenario A dan skenario B dan termuat pada Manual IKU.

IKU C.1.2 Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KBRI Rabat, yang menilai rangkaian kegiatan Perwakilan RI dalam memberikan pelayanan kepada publik sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh hukum nasional dengan memperhatikan hukum negara setempat serta kebiasaan dan hukum internasional yang mencakup, namun tidak terbatas pada layanan kependudukan, notariat, kehakiman, keimigrasian, dan ketenagakerjaan. Kepuasan pelayanan kekonsuleran diukur dari nilai persepsi masyarakat dan pemangku kepentingan atas layanan terkait pelindungan WNI di luar negeri yang diterima. Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran dilakukan dengan menggunakan kuesioner (manual dan/atau elektronik) kepada responden terhadap layanan kekonsuleran yang diberikan kepada masyarakat. Penentuan Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan

Kekonsuleran sesuai dengan Permen PAN & RB No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yakni dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 4.

IKU C.1.3 Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Pelindungan WNI KBRI Rabat, yang mengukur kualitas pemberian layanan dalam penanganan kasus, pemberian informasi melalui kampanye penyadaran publik, bimbingan teknis dan FGD. Sama seperti IKU S.3.2, penentuan Indeks Kepuasan Pelayanan Pelindungan WNI melalui survei menggunakan kuesioner (manual dan/atau elektronik) kepada responden terkait kegiatan pelayanan dan pelindungan WNI. Penentuan Nilai Persepsi Pelayanan Pelindungan WNI sesuai dengan Permen PAN & RB No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei dilakukan dengan minimal responden adalah 30 dan dengan responden yaitu orang/penerima jasa pelayanan Pelindungan WNI.

Adapun target IKU dan capaian target IKU pada Sasaran 3 KBRI Rabat tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Kode	IKU	Target 2023	Realisasi				Persentase Capaian 2023
			2020	2021	2022	2023	
C.1.1	Persentase Kasus WNI di negara akreditasi KBRI Rabat yang diselesaikan	100%	97%	89%	81.67%	100%	100%
C.1.2	Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KBRI Rabat	4 (skala 4)	3.6	3.6	3.78	3.93	98.25%
C.1.3	Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Pelindungan WNI KBRI Rabat	4 (skala 4)	3	3	3.6	4	100%

Analisis

Persentase penyelesaian kasus WNI di negara akreditasi KBRI Rabat dihitung dari penyelesaian kasus biasa dan kasus khusus yang dialami oleh WNI. Sepanjang tahun 2023 KBRI telah membantu dan memfasilitasi 3 (orang) orang WNI yang bermasalah (kasus biasa); dan menyelesaikan 1 kasus khusus yang menimpa WNI yang ada di negara akreditasi, dengan detail sebagai berikut:

Kasus biasa:

1. Penyelesaian kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berprofesi sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) di kota Casablanca, Maroko, a/n Sdri. Sindi Nuraini asal Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pada tanggal 9 Maret 2023 ybs. datang ke KBRI Rabat untuk meminta pelindungan, ybs. mengaku telah lari dari rumah majikannya yang bernama Mrs. Soukaina Maali (WN Maroko yang bersuamikan WN Arab Saudi), karena gaji yang diterima tidak sesuai dengan harapan. Sebelumnya, ybs. pernah bekerja di Arab Saudi dan menerima gaji yang lebih besar dari gaji yang diterima sekarang. Karena tuntutan terkait

gaji tidak dikabulkan, meski sudah disampaikan langsung ke majikannya maupun melalui agen pemberangkatan, maka akhirnya ybs. memutuskan untuk lari dari rumah majikannya. Mulai tanggal 9 Maret 2023, Sdri. Sindi ditampung di *shelter* KBRI dan beberapa kali dibantu KBRI melakukan kontak ke agen penyalurnya untuk segera memberikan solusi kepulangan ybs. ke kampung halamannya. Ybs. mendapatkan tiket dengan jadwal kepulangan pada tanggal 6 April 2023 dengan maskapai penerbangan Turkish Airlines dan tiba di Jakarta pada tanggal 7 April 2023. Staf KBRI telah membantu mengantar dan mengurus keberangkatan ybs. di Bandara Casablanca.

2. Pendampingan untuk PMI a.n. Kiki Zakiyah yang mengalami permasalahan dengan majikannya di kepolisian Casablanca, pada bulan April 2023 sampai saat ini.
3. Pendampingan kasus WNI a.n. Rully Sutahar yang ditipu oleh rekan bisnisnya di Doha. Ybs tinggal sementara di *shelter* KBRI sebelum nanti kembali ke Indonesia.

Kasus khusus:

Pemulangan WNI a.n. Juniarti beserta 3 (tiga) orang anaknya (anak pertama bernama Hayet Mejri/perempuan; anak kedua, Frederic Youssef Mejri/laki-laki; dan anak ketiga Eliza Christine Mejri/perempuan) pada bulan Oktober 2023. Sdr. Juniarti mengalami kekerasan dari suaminya Bilal Mejri, WN Tunisia, dan telah berada di *shelter* sejak November 2021. Kasus kekerasan ini merupakan kasus khusus karena melibatkan hukum Indonesia dan hukum Tunisia (dari sisi korban dan pelaku) dan juga hukum Maroko (dari lokasi kejadian). Dalam menangani kasus ini KBRI telah bekerja sama dengan Kedubes Tunisia, Kepolisian Maroko dan Pengadilan Maroko.

Proses pemulangan sempat terkendala karena dua dari anak ibu Juniarti memiliki paspor Tunisia. Selain itu, suami Juniarti juga selalu mengancam akan membawa anak-anak kabur di bandara jika mengetahui bahwa Juniarti dan ketiga anaknya akan dipulangkan ke Indonesia.

Indeks kepuasan pelayanan kekonsuleran dihitung dari 88 kuesioner yang dibagikan kepada WNI maupun WNA penerima layanan kekonsuleran KBRI Rabat. Jumlah ini meningkat sedikit dari jumlah partisipan tahun sebelumnya yang mencapai 82 orang. Beberapa kendala yang dialami oleh KBRI dalam pengisian indeks kepuasan ini adalah mulai diberlakukan *Visa on Arrival* kepada WN Maroko yang akan berkunjung ke Indonesia. Sehingga tidak terlalu banyak WN Maroko yang datang ke KBRI untuk memperoleh pelayanan kekonsuleran terkait visa seperti di masa pandemi. Selain itu, tidak semua WNI yang mendapatkan pelayanan kekonsuleran mengisi kuesioner yang diberikan, terutama pada ketika banyak para penerima layanan datang di saat yang bersamaan. Rekap nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran KBRI Rabat terlampir di bagian akhir laporan.

Untuk aktivitas kekonsuleran, sepanjang tahun 2023 KBRI Rabat telah melayani pembuatan 5 visa diplomatik, 32 visa reguler, 58 legalisasi dokumen, 22 dokumen SPLP, 117 pembuatan dan perpanjangan paspor, dan pembuatan 71 SKCK.

Warung Konsuler di Tetouan (3 Desember 2023) dan Tanger (4 Desember 2023).

Selain aktivitas rutin pelayanan kekonsuleran di kantor KBRI, pelayanan kekonsuleran KBRI Rabat dilakukan dengan membuka warung konsuler di Tetouan (3 Desember 2023) dan Tanger (4 Desember 2023).

Warung Konsuler tanggal 3 Desember, dilaksanakan di asrama mahasiswa WNI di kota Tetouan, sekitar 275 km dari kota Rabat ke arah utara. Total mahasiswa WNI yang kuliah di Universitas Abdelmalek Essadi, Tetouan berjumlah 9 orang (8 laki-laki dan 1 perempuan). Turut hadir 1 WNI yang berdomisili di Fnediaq (terletak di jalur antara Tetouan dan Tanger), ybs. bersuamikan warga negara Maroko.



Kegiatan Warung Konsuler di Tetouan, 3 Desember 2023

Sedangkan pada kegiatan Warung Konsuler tanggal 4 Desember 2023, KBRI Rabat melakukan pertemuan dengan mahasiswa di Institut Imam Nafie, Tanger (sekitar 250 km dari Rabat ke utara) diikuti oleh 5 orang mahasiswa/pelajar WNI. Dari kelima orang tersebut, 3 orang sudah kuliah di tingkat akhir di Institut tersebut, sementara yang 2 orang baru masuk tahun 2022 dan mengikuti pelajaran di tingkat Madrasah tahun ke 2. Kedua pelajar tersebut adalah bagian dari pelajar/mahasiswa hasil seleksi dari PBNU untuk kuliah di Maroko. Sebenarnya jumlahnya ada 4 pelajar, namun yang 2 orang sedang mengikuti kegiatan yang dilakukan bersama sekolahnya. Dengan demikian di Tanger total ada 7 mahasiswa/pelajar WNI yang kesemuanya perempuan. Kegiatan diisi dengan sosialisasi kekonsuleran, meliputi lapor diri, pengurusan dan perpanjangan izin tinggal bagi WNI di LN, pengurusan dan perpanjangan dokumen kekonsuleran lainnya, *sharing* problematika dan pemecahan solusi, serta silaturahmi dan ramah tamah.



Kegiatan Warung Konsuler di Tanger, 4 Desember 2023

Kendala yang dihadapi

Pemberian pelayanan kekonsuleran yang bertujuan untuk melindungi WNI di negara akreditasi terkendala dengan minimnya informasi mengenai keberadaan WNI di wilayah akreditasi. Hal ini karena WNI yang datang ke Maroko, baik untuk tujuan bekerja maupun berwisata, tidak memerlukan visa untuk masuk ke Maroko selama 90 (sembilan puluh) hari.

Sedangkan untuk pelayanan dan perlindungan di Mauritania, KBRI belum mengagendakan kunjungan rutin ke Mauritania untuk pelayanan kekonsuleran setiap tahunnya.

Terkait pengukuran indeks kepuasan pelayanan perlindungan WNI, hingga saat ini KBRI tidak memiliki kuesioner untuk pengukuran tersebut. Nilai yang didapatkan masih berupa perkiraan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada para penerima layanan perlindungan KBRI Rabat secara tidak terstruktur.

Solusi yang telah dilakukan

KBRI telah berupaya untuk memperoleh informasi terkait keberadaan WNI melalui berbagai group Whatsapp/media sosial lainnya yang dimiliki oleh WNI yang ada di Maroko maupun Mauritania. Selain itu, KBRI juga sering menanyakan kepada para PMI kiranya ada rekan WNI/PMI lainnya yang ada di Maroko namun belum melakukan lapor diri ke KBRI.

Pengukuran indeks kepuasan pelayanan perlindungan dilakukan dengan cara bertanya secara langsung kepada WNI yang dibantu secara tidak terstruktur.

INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE

Sasaran 4: Dukungan dan Komitmen yang Tinggi atas Kesepakatan Bilateral di Negara Akreditasi KBRI Rabat.

Pada tingkat bilateral serta forum-forum regional dan multilateral terdapat kesepakatan-kesepakatan yang disetujui bersama oleh Indonesia dan negara-negara lain. Kesepakatan tersebut perlu diimplementasikan agar dapat dirasakan kemanfaatannya oleh rakyat. Untuk itu, perlu adanya pengukuran mengenai tindaklanjut/implementasi dari kerja sama yang telah disepakati dengan langkah-langkah lanjutan/pelaksanaan, penerapan oleh *stakeholders* terkait, baik di negara Indonesia maupun di negara akreditasi.

Adapun target dan realisasi KBRI Rabat untuk sasaran 4 adalah sebagai berikut:

Kode	IKU	Target 2023	Realisasi				Persentase Capaian 2023
			2020	2021	2022	2023	
C.2.1	Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan negara akreditasi KBRI Rabat.	85%	50%	75%	125%	75%	88%

Analisis

Perhitungan realisasi dukungan dan komitmen yang tinggi atas kesepakatan bilateral di negara akreditasi dihitung dari upaya KBRI untuk menindaklanjuti/ mengimplementasikan 4 (empat) kesepakatan bilateral antara Indonesia dan negara akreditasi (Maroko dan Mauritania) yaitu:

1. Mendorong penandatanganan PTA Indonesia-Maroko yang sudah digulirkan sejak tahun 2018;
2. Proses Penandatanganan MoU antara BPJPH dengan IMANOR Maroko;
3. MoU Indonesia-Mauritania di bidang kerjasama diplomatik (*Joint Communique concerning the Establishment of Diplomatic Relations between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Mauritania*), dan
4. MoU antara KBRI Rabat dengan Universitas Hassan I, Settat, terkait pembuatan *Indonesia Cultural Center* di kampus Universitas Hassan I, Settat.

KBRI telah menindaklanjuti ke-empat (rencana) kerja sama atau kesepakatan bilateral tersebut, melalui langkah-langkah berikut:

1. Dalam rangka mendorong percepatan perundingan Preferential Trade Agreement (PTA) Indonesia-Maroko, KBRI telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Perdagangan Maroko dan mendapatkan informasi Menteri Perdagangan RI akan melakukan kunjungan ke Maroko pada tanggal 22 – 23 Februari 2023, yang kemudian diundur menjadi tanggal 16- 20 Mei 2023. Namun karena padatnya jadwal Menteri Perdagangan RI, kunjungan tidak jadi dilaksanakan.

Selain itu, KBRI juga telah memfasilitasi pertemuan antara Konhor RI di Casablanca dengan Wakil Kepala ITPC Barcelona pada tanggal 5 Mei 2023 di Casablanca. Pertemuan membahas rencana untuk mendorong para pengusaha Indonesia untuk dapat memasukan barangnya melalui Spanyol, yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong terwujudnya PTA Indonesia-Maroko.

2. Fasilitasi proses pembuatan MoU antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Indonesia dan IMANOR Maroko melalui penyampaian draft MoU BPJPH – IMANOR pada bulan Februari 2023, vide nota dinas no. 08464/BK/02/2023/32 perihal Permintaan Tanggapan atas MoU Kerja Sama Sertifikasi Produk Halal RI-Maroko.

Selain itu KBRI juga telah siap memfasilitasi pertemuan online antara BPJPH dan IMANOR Maroko yang semula dijadwalkan pada tanggal 28 Juni 2023, namun belum dapat terlaksana karena ketiadaan konfirmasi dari pihak BPJPH.

3. MoU Indonesia-Mauritania di bidang diplomatik ditindaklanjuti melalui pendampingan delegasi RI pada pertemuan KTM ke-49 OKI yang berlangsung di Nouakchott pada tanggal 16 -17 Maret 2023. Di sela-sela pertemuan, Dirjen Multilateral Kemlu RI selaku ketua Delri juga melakukan pertemuan dengan calon Konsul Kehormatan Indonesia di Mauritania, Sidi Mohammad, pada tanggal 15 Maret 2023. Pada pertemuan dengan calon Konhor tersebut dibahas isu-isu bilateral, dan peluang kerja sama pembangunan melalui kerangka OKI.



Pertemuan Delri pada KTM ke-49 OKI dengan Sidi Mohammad (kedua dari kanan), calon Konhor RI di Mauritania tanggal 15 Maret 2023.

4. Sedangkan, sepanjang tahun 2023 ini, MoU antara KBRI Rabat dan Universitas Hassan I, Settat terkait pendirian Indonesian Cultural Center belum dapat ditindaklanjuti karena ketiadaan dana untuk kegiatan.

Selain itu, kegiatan dukungan KBRI Rabat yang telah dilaksanakan untuk mendukung pada implementasi kerja sama lainnya adalah:

5. Pendampingan Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI pada *Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue*, Marrakesh 13-15 Juni 2023.

Delegasi DPR RI, yang diketuai oleh Ketua BKSAP Bapak Fadli Zon, mengikuti berbagai rangkaian agenda sebagai berikut:

- a. Ketua BSKAP DPR RI Fadli Zon dan Anggota BKSAP Syahrul Aidi Maazat menghadiri sesi *general debate* yang berjudul “Parliaments and religious leaders: Promoting dialogue, working together for our common future”.
- b. Pada waktu bersamaan, delegasi DPR juga menghadiri berbagai rangkaian diskusi. Diantaranya, Wakil Ketua BSKAP Achmad Hafisz Tohir dan Anggota BSKAP Primus Yustisio yang hadir pada diskusi panel *Track 1 (the rule of law) Religion and beliefs in different secular systems: Examples from around the world*.
- c. Wakil Ketua BSKAP Sukamta dan Anggota BSKAP Syaikhul Islam hadir pada *panel Track 2 (Peace and inclusion) How can parliamentarians cooperate with religious communities and faith-based organizations to mobilize society for greater moderation, solidarity and inclusion*.
- d. Hadir pada panel Track 1 hari kedua Wakil Ketua BKSAP Sukamta yang memaparkan tentang kemajemukan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Ia mengatakan bahwa penegakan hukum tetap menjadi prioritas utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.



Ketua BSKAP DPR RI, Fadli Zon, menjadi salah satu pembicara pada *Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue* di Marrakech.



Rombongan BKSAP DPR RI bersama Ketua *House of Representative* Maroko, Rachid Talbi Alami (tengah) dalam kegiatan *Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue*

6. Pendampingan kunjungan delegasi Kepala BNPT RI Komjen Pol. Prof. Dr. H. Rycko Amelza Dahniel beserta rombongan melaksanakan kunjungan kerja ke Kerajaan Maroko, tanggal 23-29 Agustus 2023. High Level Visit tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerja sama yang telah terjalin, dengan agenda :
 - a. *High Level Visit* Kepala BNPT RI dengan Head of General Directorate for Studies and Documentation (DGED) Maroko;
 - b. Pertemuan *Joint Working Group* (JWG) dengan Mitra General Directorate for National Security (DGSN) Kementerian Dalam Negeri Maroko;
 - c. Silaturahmi Kepala BNPT RI dengan Masyarakat dan Mahasiswa Indonesia di Maroko;
 - d. *Site Visit* ke the Mohammed VI Institute for the Training of Imams, Morchidines and Morchidates (Religious Preachers);
 - e. Pertemuan dengan Pimpinan General Directorate for Territorial Surveillance (DGST) Maroko.

7. Pendampingan protokol delegasi Menteri Keuangan RI dan Gubernur Bank Indonesia dalam rangka menghadiri World Bank – IMF Meeting di Marrakech, tanggal 9 – 15 Oktober 2023.



Pendampingan Menteri Keuangan RI di bandara Menara, Marrakech oleh Dubes RI dan PF Protokol KBRI Rabat tanggal 9 Oktober 2023.

Kendala yang dihadapi

Kendala yang dihadapi dalam menindaklanjuti berbagai kesepakatan antara Indonesia dan negara akreditasi adalah belum adanya keterlibatan yang aktif dari Kementerian/Lembaga teknis terkait maupun pihak lain yang bekerja sama. Sebagai contoh, dalam MoU pendirian Indonesia Cultural Center, kerja sama juga melibatkan perguruan tinggi di Indonesia. Namun, hingga saat ini inisiatif tindak lanjut kerja sama dari pihak kedua universitas (baik itu Universitas Hassan I, Settat maupun Universitas Negeri Semarang), masih belum ada.

Sedangkan untuk PTA Indonesia-Maroko, upaya pembuatan PTA masih terhambat dengan isu politik Maroko perihal Sahara Barat. Pihak Pemerintah Maroko secara tidak langsung

selalu mengkaitkan proses pembuatan PTA ini dengan sikap Pemerintah Indonesia yang netral dan diartikan oleh Pemerintah Maroko 'tidak mendukung Maroko di isu Sahara Barat'.

Solusi yang telah dilakukan

KBRI telah berupaya menyampaikan kepada K/L teknis dan pihak terkait di Indonesia perihal perkembangan kerja sama dan tindak lanjut yang harus dilakukan melalui berbagai laporan yang disampaikan ke kantor pusat.

Sasaran 5: Diplomasi Bilateral di Negara Akreditasi KBRI Rabat yang Kuat.

Sasaran strategis ini berfokus pada pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan diplomasi bilateral. Relasi bilateral perlu didorong untuk bersifat mutualistik, yakni di satu sisi dapat memastikan terjaganya kepentingan Indonesia, dan di sisi lain, relasi tersebut mampu memberikan manfaat bagi ke dua belah pihak. Hubungan bilateral mencakup sejumlah bidang, yakni ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan, serta maritim. Dalam dinamika relasi antar negara, kepentingan Indonesia di bidang tersebut diperjuangkan melalui diplomasi bilateral. Sejumlah hal menyangkut kepentingan Indonesia dapat diusulkan, dan selanjutnya dibahas melalui proses negosiasi dan perundingan. Kinerja terkait sasaran strategis ini adalah keberhasilan mencapai kesepakatan yang memberikan kepastian terhadap terjaganya kepentingan Indonesia dalam hubungan antar negara. Sasaran strategis ini mencerminkan prioritas strategis yang mesti dicapai oleh Perwakilan RI dalam rangka relasi bilateral antara Indonesia dengan Maroko dan Mauritania.

Kode	IKU	Target 2023	Realisasi				Persentase Capaian 2023
			2020	2021	2022	2023	
B.1.1	Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan negara akreditasi KBRI Rabat.	1	0	1	2	3	120%
B.1.2	Jumlah Kesepakatan di Bidang Diplomasi Polkam dengan negara akreditasi KBRI Rabat.	1	0	0	0	2	120%
B.1.3	Indeks Respons Positif terhadap Informasi <i>Data Economic Intelligence/Market Intelligence</i> KBRI Rabat.	5 (skala 5)	4	4	3	5	100%

Analisis

Target pencapaian kesepakatan di bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya telah tercapai dengan baik, melalui penandatanganan 3 (tiga) MoU, yaitu 1) antara IAIN Kudus dengan Universitas Sidi Muhammad Ben Abdellah (USMBA), Fes, Maroko perihal Nota Kesepahaman Kerja Sama, tanggal 15 Maret 2023; 2) MoU antara Ponpes Dar El Qalam, Tangerang dengan Universitas Mohamad I, Oujda, dan 3) MoU antara Ponpes Daarul Mughni Bogor dengan Universitas Mohamad I, Oujda. Salinan MoU terlampir di bagian akhir laporan ini. Adapun detail informasi terkait MoU yang telah disepakati adalah sebagai berikut:

1. MoU antara IAIN Kudus; dan USMBA, Fes.
MoU antara IAIN Kudus dengan USMBA, Fes memuat poin kerja sama sebagai berikut: 1) pertukaran pimpinan dan dosen untuk memberikan kuliah; 2) penyelenggaraan Konferensi Ilmiah dan Budaya; dan 3) penerbitan dan pencetakan ulang penelitian sesuai kebutuhan kedua lembaga.
2. MoU antara Ponpes Dar El Qalam, Tangerang dengan Universitas Moh. I, Oujda.
MoU berisikan mengenai pemberian beasiswa (*partial*) kepada 20 (dua puluh) siswa/i dari Ponpes Dar El Qalam, Tangerang untuk melanjutkan studi ke Universitas Mohammed I di Oujda untuk tahun ajaran 2023/2024. Berdasarkan isi perjanjian, jumlah penerima beasiswa bisa saja meningkat di tahun berikutnya.
3. MoU antara Ponpes Darul Mughni, Bogor dengan Universitas Moh. I, Oujda
Sama dengan perjanjian antara Ponpes Dar El Qalam dan Universitas Mohamed I, Oujda, MoU berisikan mengenai pemberian beasiswa (*partial*) kepada 20 (dua puluh) siswa/i dari Ponpes Darul Mughni, Bogor untuk melanjutkan studi ke Universitas Mohammed I di Oujda untuk tahun ajaran 2023/2024. Berdasarkan isi perjanjian, jumlah penerima beasiswa bisa saja meningkat di tahun berikutnya.

Selain kesepakatan di bidang ekonomi dan sosial budaya, pada tahun 2023 juga telah dilakukan penandatanganan 2 (dua) MoU untuk bidang politik, yaitu :

1. Memorandum of Understanding Pemri-WWC-INBO, 6 Juli 2023
Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah RI (Kementerian PUPR), World Water Council, dan International Network of Basin Organization (INBO) telah dilakukan di Fes pada 6 Juli 2023.

MoU tersebut menegaskan dukungan terhadap penyelenggaraan World Water Forum (WWF) yang ke-10 pada tanggal 18-24 Mei 2024 di Bali, khususnya melalui persiapan aktif proses politik tingkat tinggi pada segmen wilayah sungai (*basin segment*) forum dimaksud. Tujuannya adalah untuk mendorong dialog antara para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya air di tingkat wilayah sungai dan untuk mendukung komitmen yang dibuat oleh dan untuk organisasi daerah aliran sungai. Segmen wilayah sungai ini akan diintegrasikan ke dalam proses politik WWF ke-10, dan juga dikaitkan dengan proses regional dan tematik forum tersebut.



Dubes RI Rabat (kiri) mendampingi Sahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi, Dadang Rukmana (kedua dari kanan) dan *Minister of Equipment and Water* Maroko, Nizar Baraka (tengah) dalam penandatanganan MoU



Penandatanganan MoU antara Pemri-WWC-INBO

2. Memorandum of Understanding on Strategic Partnership RI-Maroko, 22 Desember 2023

MoU mengenai Kemitraan Strategis RI-Maroko telah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita pada 22 Desember 2023 setelah pertemuan bilateral kedua Menlu tersebut di Rabat.

Peningkatan status kemitraan yang dituangkan dalam MoU tersebut mencerminkan komitmen kedua negara untuk lebih memperkokoh dan memperluas kerja sama bilateral. MoU tersebut mencakup peningkatan kerja sama pada sektor-sektor yang strategis dan signifikan, seperti politik dan keamanan, kerja sama regional dan global, kemitraan ekonomi, kerja sama pembangunan, termasuk kerja sama triangular, kerja sama sosial budaya serta kerja sama kekonsuleran dan keimigrasian. Guna memastikan implementasi MoU Kemitraan Strategis yang terarah dan terukur, Indonesia dan Maroko juga sepakat untuk kembali mengaktifkan mekanisme pertemuan bilateral rutin pada tingkat Menteri dalam rangka memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara.

Outcome lain yang dihasilkan dari kunjungan Menlu RI ke Maroko adalah adanya penambahan kuota mahasiswa Indonesia penerima beasiswa dari Kerajaan Maroko, yang semula berjumlah 30 orang menjadi 50 orang, dan mulai berlaku untuk penerimaan tahun ajaran 2024/2025.



Penandatanganan MoU on Strategic Partnership RI-Maroko oleh Menlu RI, Retno Marsudi, dan Menlu Maroko, Nasser Bourita.



Penandatanganan MoU on Strategic Partnership RI-Maroko oleh Menlu RI, Retno Marsudi, dan Menlu Maroko, Nasser Bourita.

Data Economic Intelligence (DEI) KBRI Rabat tahun 2022 telah dibuat dan dilaporkan ke kantor pusat pada awal tahun 2023. Isi dan informasi yang tertuang dalam DEI KBRI Rabat 2022 juga telah dimanfaatkan oleh beberapa *stakeholders* penting dalam negeri, antara lain:

1. PT Dexe Medica yang telah melakukan pertemuan dengan berbagai pihak terkait di Maroko pada tanggal 13-14 Februari 2022 (vide brafaks laporan No. B-00046/RABAT/230217 perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Business Matching Dexe Medica, 13-14 Februari 2023), dan
2. ITPC Barcelona dan para partisipan pengusaha Indonesia pada kegiatan SIAM Meknes 2023 (vide brafaks No. B-00099/Rabat/230509 perihal Laporan Partisipasi KBRI Rabat pada *Salon International L'Agriculture au Maroc* di Kota Meknes (SIAM Meknes) 2023).

Kendala yang dihadapi

KBRI tidak terlibat di dalam proses pembuatan seluruh kesepakatan di bidang ekonomi sosial budaya yang dibuat di tahun 2023 tersebut, dan baru mengetahui Informasi terkait MoU setelah MoU-MoU tersebut selesai dibuat. Bahkan untuk MoU antara Ponpes Dar EL Qalam dan Darul Mughni dengan Universitas Mohamed I, Oujada, KBRI baru menerima informasi setelah adanya pengiriman calon mahasiswa ke Universitas Mohamed I, Oujda di bulan Oktober 2023.

Sedangkan pada pembuatan MoU di bidang politik, KBRI hanya bertindak sebagai perantara tanpa terlibat dalam pembuatan kecuali untuk MoU Strategic Partnership Indonesia – Maroko yang ditandatangani oleh Menlu dari kedua negara.

Melihat dua hal di atas, sama seperti halnya dengan capaian pada IKU di Sasaran Strategis pertama, jumlah kesepakatan yang dibuat antara Indonesia dengan negara akreditasi menjadi IKU yang menjadi di luar kontrol KBRI sepenuhnya. Adapun yang dapat dilakukan oleh KBRI adalah memberikan saran sekiranya ada hal-hal dari MoU tersebut yang berpotensi memiliki implikasi politis, dan mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara akreditasi di masa mendatang. Namun, pemberian saran tersebut juga hanya dapat dilakukan apabila pihak-pihak yang akan melakukan kerja sama meminta kepada pihak KBRI (*demand driven*).

Solusi yang telah dilakukan

KBRI telah berupaya untuk melakukan komunikasi dengan pihak-pihak (baik dari Indonesia maupun negara akreditasi) yang berpotensi akan memiliki kerja sama (membuat MoU).

Sasaran 6: Basis Data WNI KBRI Rabat yang Kuat.

Dalam rangka mendukung kebijakan "Satu Data Indonesia", KBRI mendukung Kementerian Luar Negeri RI dalam pemanfaatan sistem informasi untuk memastikan keakuratan data WNI di luar negeri. Salah satu tantangan Pemerintah terkait data WNI adalah data WNI yang ada di luar negeri belum terintegrasi dengan sistem data nasional. Data WNI yang terdapat di sistem informasi Kementerian Luar Negeri merupakan *database* pada Portal Peduli WNI yang berbeda dengan data yang ada pada Lembaga Pemerintah lain seperti: KPU, BNP2TKI, Perbankan, Ditjen Imigrasi maupun Dukcapil. Apabila data yang tidak terintegrasi pada sistem data nasional memungkinkan terjadi duplikasi data, maka akan menjadi kendala bagi Pemerintah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan publik dan perlindungan WNI di luar negeri yang berkualitas.

Basis data merupakan *database* WNI di Luar Negeri yang tersimpan secara terstruktur, sistematis dan daring dan/atau luring dalam sistem informasi pelayanan dan perlindungan WNI yang dapat diolah untuk menghasilkan informasi.

Persentase jumlah WNI yang terdaftar di Portal Peduli WNI menghitung persentase data WNI yang tercantum dan terverifikasi oleh Perwakilan RI di luar negeri di Portal Peduli WNI dibanding jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) WNI di wilayah kerja Perwakilan RI pada Pemilu 2019.

Database WNI di Luar Negeri pada Portal Peduli WNI berdasarkan penginputan data WNI secara *online* yang dilakukan oleh WNI sendiri dan/atau staf Perwakilan RI yang berwenang. Portal Peduli WNI secara berkala dilakukan penginian dan *back-up* data WNI atau *master data* oleh staf Perwakilan RI dan *update* Portal Peduli WNI.

Terlampir data target dan realisasi Data WNI KBRI Rabat tahun 2023:

Kode	IKU	Target 2023	Realisasi				Persentase Capaian 2023
			2020	2021	2022	2023	
B.2.1	Persentase WNI di negara akreditasi KBRI Rabat yang Terdaftar di Portal Peduli WNI.	100%	5%	32%	77.93%	100%	100%

Analisis

Persentasi WNI di negara akreditasi yang terdaftar di Portal Peduli WNI merupakan salah satu basis informasi yang digunakan oleh KBRI dalam menyusun program perlindungan WNI. KBRI terus berupaya meningkatkan persentase terdaftarnya WNI di portal tersebut melalui kegiatan sosialisasi Portal Peduli WNI. Adapun di tahun ini, kegiatan sosialisasi dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Warung Konsuler di Tetouan tanggal 3 Desember 2023 dan Tangerang tanggal 4 Desember 2023. Tahun ini kegiatan sosialisasi difokuskan kepada para mahasiswa yang baru tiba di Maroko sebagai bagian dari program perlindungan WNI di luar negeri.

Kendala yang dihadapi

Pada tahun 2023 ini, jumlah WNI yang terdaftar di Portal Peduli WNI telah memenuhi target 100% (jumlah WNI yang terdaftar dibanding jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) WNI di wilayah kerja Perwakilan RI pada Pemilu 2019).

Solusi yang telah dilakukan

KBRI telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan mengintegrasikannya dengan kegiatan kekonsuleran lainnya.

LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE

Sasaran 7: Tata Kelola Organisasi KBRI Rabat yang Baik.

Nilai evaluasi AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang

telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pengukuran Nilai Evaluasi AKIP ini mengacu pada Permen PAN & RB No. 88 Tahun 2021 dan Permenlu No. 7 Tahun 2021

Sesuai dengan Permen PAN & RB No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, penilaian evaluasi AKIP meliputi lima komponen dan bobot, yaitu: (1) perencanaan kinerja: 30%; (2) pengukuran kinerja: 25%; (3) pelaporan kinerja: 15%; (4) evaluasi internal: 10%; dan (5) capaian kinerja: 20%.

Klasifikasi nilai evaluasi AKIP:

- (1) AA (Skor > 90-100); Sangat Memuaskan
- (2) A (Skor > 80-90); Memuaskan
- (3) BB (Skor > 70-80); Sangat Baik
- (4) B (Skor > 60-70); Baik
- (5) CC (>50-60); Cukup
- (6) C (>30-50); Kurang
- (7) D (0-30); Sangat Kurang

Nilai evaluasi AKIP Perwakilan RI menggunakan nilai evaluasi AKIP Perwakilan RI tahun sebelumnya yang diterima pada tahun 2022, dengan target dan capaian sebagai berikut:

Kode	IKU	Target 2023	Realisasi				Persentase Capaian 2023
			2020	2021	2022	2023	
L.1.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Rabat	73 (BB)	72.48 (BB)	72,93 (BB)	70,64 (BB)	71.65 (BB)	98%

Analisis

Berdasarkan penilaian Kemlu Pusat, KBRI Rabat telah menyusun dokumen perencanaan kinerja jangka menengah (Renstra Tahun 2020 - 2024) dan jangka pendek/tahunan (Renja tahun 2022 dan 2023). Rencana kinerja tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022 dan 2023 yang memuat sasaran strategis dan target kinerja yang akan dicapai pada masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Rencana Aksi yang akan dilakukan dalam mencapai target kinerja yang diperjanjikan.

Sementara itu dari aspek kualitas, perencanaan kinerja KBRI Rabat telah memadai dan memenuhi sebagian besar seluruh kriteria penilaian. Akan tetapi dari aspek pemanfaatan, dokumen perencanaan kinerja belum dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan penyusunan perencanaan secara berkesinambungan.

Beberapa hal penting yang mendukung pencapaian kinerja pada komponen Perencanaan kinerja, diantaranya:

1. Dokumen perencanaan kinerja tahun 2022 telah diformalkan dan dipublikasikan;

2. IKU telah memenuhi kriteria SMART;
3. Dokumen perencanaan telah selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan dan juga hingga tingkat individu; dan
4. Sebagian besar target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*

Kendala yang dihadapi

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pencapaian target nilai evaluasi AKIP, antara lain:

1. Keterbatasan waktu pengerjaan administrasi manajemen kinerja yang harus berbenturan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi utama Pejabat Diplomatik dan Konsuler.
2. Pelaksanaan kegiatan yang terkadang tidak sesuai dengan rencana aksi, sehingga menyulitkan evaluasi kinerja dan pembuatan laporan di akhir tahun.
3. Belum adanya evaluasi kinerja yang menyeluruh di akhir tahun kegiatan.
4. Pada tahun 2022, Kemlu pusat mengevaluasi nilai AKIP seluruh perwakilan sehingga target yang dibuat harus menyesuaikan dengan capaian-capaian di tahun sebelumnya. Untuk itu, target nilai AKIP pada Renstra 2020-2024 menjadi lebih tinggi dibanding dengan realisasi.

Solusi yang telah dilakukan

KBRI telah berupaya untuk melakukan koordinasi internal serta melibatkan seluruh staf untuk kiranya dapat berkontribusi sesuai dengan tupoksinya pada proses pengisian dan pembuatan berbagai dokumen yang diperlukan untuk penilaian AKIP. Selain itu, KBRI juga telah mengupayakan pengiriman dokumen administrasi sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan oleh pusat. Terkait kendala nomor 4, KBRI telah menyesuaikan target sesuai dengan arahan dari pusat.

Sasaran 8: Pengelolaan Aset KBRI Rabat.

Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri adalah rata-rata tertimbang (*weighted average*) dari (i) indeks terkait temuan BPK LKPP terkait BMN K/L, (ii) indeks terkait realisasi PNBPN dari pengelolaan aset, (iii) indeks terkait ketepatan waktu penyampaian laporan dan RKBMN, (iv) indeks terkait asuransi BMN, (v) indeks terkait tindak lanjut pengelolaan BMN, (vi) indeks terkait persentase penyelesaian temuan BPK terkait BMN, (vii) indeks terkait persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan.

Sesuai Permen PAN & RB No. 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka Kementerian Keuangan telah merumuskan formula Indeks Pengelolaan Aset (IPA). IPA menjadi satu bagian pengukuran dari area perubahan reformasi pada penatalaksanaan yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi, proses dan prosedur kerja masing-masing K/L.

Ada 4 parameter dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Aset, yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan Negara yang akuntabel dan produktif, yang mencakup (i) temuan BPK LKPP terkait BMN pada K/L (materialitas temuan BPK LKPP terkait BMN pada K/L dan temuan BPK LKPP terkait BMN pada K/L) dan (ii) realisasi PNBPN dari pengelolaan aset.
2. Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan, yang mencakup

- (i) ketepatan waktu penyampaian laporan dan RKBMN (ketepatan waktu penyampaian RKBMN, ketepatan waktu penyampaian LBP, ketepatan waktu penyampaian laporan Wasdal) dan (ii) asuransi BMN.
3. Pengawasan dan pengendalian yang efektif, yang mencakup (i) tindak lanjut pengelolaan BMN (tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN, tindak lanjut terhadap BMN rusak berat) dan (ii) persentase penyelesaian temuan BPK terkait BMN.
 4. Administrasi BMN yang handal, yang mencakup persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan.

Kode	IKU	Target 2023	Realisasi				Persentase Capaian 2023
			2020	2021	2022	2023	
L.2.1	Indeks Pengelolaan Aset KBRI Rabat	2.9 (Skala 4)	N/A	N/A	2.86	2.91	

Analisis

Realisasi capaian Sasaran 9 dihitung dari Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri berdasarkan rata-rata tertimbang (*weighted average*) dari (i) indeks terkait temuan BPK LKPP terkait BMN K/L, (ii) indeks terkait realisasi PNPB dari pengelolaan aset, (iii) indeks terkait ketepatan waktu penyampaian laporan dan RKBMN, (iv) indeks terkait asuransi BMN, (v) indeks terkait tindak lanjut pengelolaan BMN, (vi) indeks terkait persentase penyelesaian temuan BPK terkait BMN, (vii) indeks terkait persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan.

Sesuai Permen PAN & RB No. 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka Kementerian Keuangan telah merumuskan formula Indeks Pengelolaan Aset (IPA). IPA menjadi satu bagian pengukuran dari area perubahan reformasi pada penatalaksanaan yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi, proses dan prosedur kerja masing-masing K/L.

Ada 4 parameter dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Aset, yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan Negara yang akuntabel dan produktif, yang mencakup (i) temuan BPK LKPP terkait BMN pada K/L (materialitas temuan BPK LKPP terkait BMN pada K/L dan temuan BPK LKPP terkait BMN pada K/L) dan (ii) realisasi PNPB dari pengelolaan aset.
2. Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan, yang mencakup (i) ketepatan waktu penyampaian laporan dan RKBMN (ketepatan waktu penyampaian RKBMN, ketepatan waktu penyampaian LBP, ketepatan waktu penyampaian laporan Wasdal) dan (ii) asuransi BMN.
3. Pengawasan dan pengendalian yang efektif, yang mencakup (i) tindak lanjut pengelolaan BMN (tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN, tindak lanjut terhadap BMN rusak berat) dan (ii) persentase penyelesaian temuan BPK terkait BMN.
4. Administrasi BMN yang handal, yang mencakup persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan.

Adapun nilai yang digunakan adalah nilai dari Kementerian Keuangan yang ditetapkan untuk Kementerian Luar Negeri.

Kendala yang dihadapi

Hingga saat ini, belum ada pengukuran indeks pengelolaan aset untuk perwakilan. Untuk itu, nilai yang dicantumkan masih merupakan nilai IPA untuk Kementerian Luar Negeri secara keseluruhan.

Terkait pengadaan barang, KBRI kesulitan untuk memperoleh barang dengan spesifikasi dan harga yang sesuai karena mayoritas produk di Maroko adalah barang impor sehingga perubahan harga terjadi cukup sering sesuai dengan nilai tukar dollar Amerika. Sedangkan, untuk pengelolaan, KBRI masih kesulitan untuk pemeliharaan, terutama kendaraan bermotor dan barang lainnya, yang *sparepart* atau suku cadangnya tidak ada di Maroko, atau terlalu mahal.

Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan IKU baru yang diadopsi mulai tahun 2022. Untuk itu, capaian pada sasaran ini tidak bisa dibandingkan dengan target yang tertuang pada Renstra 2020-2024, karena Renstra tidak memuat sasaran tersebut.

Solusi yang telah dilakukan

Menjalin komunikasi dengan rekanan yang terpercaya dan bersedia mencarikan barang yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan serta melakukan perencanaan pemeliharaan sehingga jika pada waktunya diperlukan penggantian suku cadang tidak mengalami kesulitan karena telah dipesan sejak jauh hari.

Sasaran 9: Pengelolaan Anggaran KBRI Rabat yang Optimal dan Akuntabel.

Penilaian atas kinerja anggaran dilakukan oleh pihak luar di luar Kementerian Luar Negeri yaitu Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Kementerian Keuangan. Nilai kinerja anggaran terdiri dari dua perhitungan, yaitu nilai evaluasi kinerja anggaran dan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Bobot untuk variabel tersebut masing-masing sebesar 60% dan 40%. Nilai evaluasi kinerja anggaran tercantum pada aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan. Sementara, nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan nilai indikator kinerja atas pelaksanaan anggaran K/L yang tercantum pada sistem informasi Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terdiri dari 4 aspek pelaksanaan anggaran yaitu: Kesesuaian antara Perencanaan dan Pelaksanaan, Kepatuhan terhadap Regulasi, Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan, Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan. Indikator IKPA diantaranya: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pagu Minus, Retur SP2D, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Penyampaian Data Kontrak, Pengelolaan Uang Persediaan, Penyampaian LPJ Bendahara, Dispensasi SPM, Kesalahan SPM, Perencanaan Kas.

Sedangkan kriteria pada SMART merupakan pencapaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam tusi kerja berupa keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Kode	IKU	Target 2023	Realisasi				Persentase Capaian 2023
			2020	2021	2022	2023	
L.3.1	Nilai Kinerja Anggaran KBRI Rabat	85%	87.5%	90.83%	78.73%	88.61%	104%

Analisis

Nilai Kinerja Anggaran KBRI Rabat tahun 2023 meningkat hampir 10% dari tahun sebelumnya, menjadi 88.61%. Nilai tersebut diperoleh dari gabungan nilai SMART sebesar 87.45 dan IKPA sebesar 89.76 poin. Dengan demikian, capaian Nilai Kinerja Anggaran KBRI Rabat menjadi 104%. Capaian yang baik ini karena pada tahun 2023, terdapat beberapa kegiatan KBRI Rabat yang cukup menyerap anggaran dengan sangat besar, antara lain: Pameran SIAM Meknes dan Resepsi Diplomatik. Namun demikian, masih ada beberapa mata anggaran untuk kegiatan yang belum dapat dilaksanakan, seperti *Familiarization Trip* dan dukungan untuk *Trade Expo Indonesia* yang belum bisa mendatangkan *influencer* dan para pebisnis dari negara akreditasi ke Indonesia.

Kendala yang dihadapi

Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran ini adalah tidak terlaksananya beberapa kegiatan seperti Famtrip dan TEI. Selain itu, terdapat beberapa anggaran belanja modal yang bersumber dari PNBPN tidak dapat digunakan karena adanya perbedaan kurs yang cukup signifikan saat pengajuan TUP dan pada saat pertanggungjawaban, sehingga sisa anggaran PNBPN tidak dapat lagi dicairkan.

Solusi yang telah dilakukan

KBRI terus berkoordinasi dengan Kemlu Pusat terkait penggunaan anggaran serta serta mengakomodir perubahan prioritas pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran anggaran dengan melakukan beberapa revisi pada DIPA TA 2023.

3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

Realisasi Anggaran KBRI Rabat TA 2023			
Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (R/T)
Penyelenggaraan kegiatan dukungan manajemen pada perwakilan	Rp 16.639.668.000	Rp 16.377.596.571	98.43%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perwakilan RI	Rp 2.127.200.000	Rp 2.068.187.349	97.23%
Penyelenggaraan Diplomasi dan Kerja Sama Internasional	Rp 2.074.174.000	Rp 2.044.254.391	98.56%
Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik	Rp 177.882.000	Rp 158.661.508	89.19%

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan analisis capaian kinerja KBRI Rabat 2023 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara kuantitatif, KBRI Rabat telah mencapai target seluruh IKU dan sub-IKU dengan sangat baik, seluruh kegiatan juga telah terlaksana dengan baik. Namun, dari sisi kualitas, masih banyak hal yang dapat ditingkatkan lagi, utamanya melalui pelibatan aktif berbagai *stakeholders*, baik di dalam maupun luar negeri. Sebagai contoh, untuk bidang Ekonomi KBRI berharap akan ada lebih banyak perusahaan Indonesia yang aktif untuk melakukan peninjauan dengan calon mitra di negara akreditasi. Sedangkan untuk bidang Pensosbud, kiranya aktivitas promosi dapat lebih banyak melibatkan kalangan profesional dibandingkan hanya menggunakan mahasiswa sebagai penampil di berbagai kegiatan. Selain itu, kurs dan inflasi berpengaruh terhadap ketersediaan anggaran. Sehingga beberapa rencana kegiatan mengalami penyesuaian dari sisi anggaran.
2. Sepanjang tahun 2023, KBRI tidak memiliki kegiatan khusus di negara akreditasi Mauritania. Hal ini disebabkan oleh minimnya dana yang dimiliki oleh KBRI dan tidak adanya arahan yang khusus dari kantor pusat terkait kebijakan di Mauritania. KBRI memandang, Mauritania memiliki potensi yang sama besarnya dengan Maroko, terutama di bidang pertambangan dan perikanan. Selain itu, sistem pemerintah Mauritania yang demokratis juga memungkinkan adanya keterbukaan pasar yang besar bagi pihak asing.
3. Beberapa IKU mengalami perubahan cara perhitungan dan target. Untuk itu, KBRI Rabat tidak bisa membandingkan realisasi capaian tahun 2023 dengan target yang tertuang pada Renstra 2020-2024.
4. Di bidang konsuler dan perlindungan WNI, fokus KBRI lebih banyak diberikan kepada Maroko karena jumlah WNI yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan Mauritania. Hingga saat ini, tercatat ada kurang lebih 500 WNI di Maroko sedangkan di Mauritania hanya berjumlah kurang dari 20 orang. Tantangan terbesar di bidang konsuler ini adalah masih banyaknya pekerja migran Indonesia di Maroko yang belum menyadari pentingnya kegiatan lapor diri sebagai bagian dari perlindungan WNI, utamanya yang bersifat pencegahan. Namun, KBRI telah melakukan beberapa kegiatan *outreach*, memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada WNI pentingnya melakukan upaya-upaya perlindungan yang bersifat pencegahan. Selain itu, selain memberikan kemudahan *people to people contact* dan mobilitas WNI di Maroko, bebas visa juga menjadi salah satu tantangan yang menyulitkan KBRI untuk dapat mendata berapa banyak WNI yang ada di Maroko.
5. Dengan Laporan Kinerja ini, KBRI Rabat menyadari bahwa masih ada hal-hal yang dapat diperbaiki di masa mendatang untuk mencapai kinerja yang lebih baik lagi.

Rabat, 20 Januari 2024

LAMPIRAN - LAMPIRAN